



PPFAD.

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penambahan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penambahan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa lampiran dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa lampiran dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran IV diubah sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran V diubah sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Juli 2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 36

1			2	3
101	XX	15.36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	15.37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	15.38	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	
101	XX	15.39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	
101	XX	15.40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	
101	XX	15.41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	
101	XX	15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
101	XX	15.43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	15.44	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	
101	XX	15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
101	XX	15.46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	
101	XX	15.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	
101	XX	15.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	
101	XX	15.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain	
101	XX	15.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	
101	XX	15.51	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	15.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	15.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	
101	XX	15.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	
101	XX	15.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	15.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	15.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	
101	XX	15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.62	Pengembangan kurikulum; bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.66	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
101	XX	16.01	Pembangunan gedung sekolah	
101	XX	16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	
101	XX	16.04	Penambahan ruang guru sekolah	
101	XX	16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	
101	XX	16.06	Pembangunan ruang locker siswa	
101	XX	16.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	16.08	Pembangunan ruang serba guna/aula	
101	XX	16.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	16.11	Pembangunan ruang ibadah	
101	XX	16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	
101	XX	16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
101	XX	16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	
101	XX	16.17	Pengadaan pakaian olahraga	
101	XX	16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	
101	XX	16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	
101	XX	16.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	
101	XX	16.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah	
101	XX	16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	
101	XX	16.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	16.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	
101	XX	16.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	
101	XX	16.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa	
101	XX	16.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	16.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula	
101	XX	16.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	16.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	16.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	
101	XX	16.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	
101	XX	16.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	16.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	16.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	16.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	
101	XX	16.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	
101	XX	16.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	
101	XX	16.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	
101	XX	16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
101	XX	16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	16.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	
101	XX	16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
101	XX	16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	
101	XX	16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	
101	XX	16.47	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah	
101	XX	16.48	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	
101	XX	16.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	

1			2	3
101	XX	16.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	
101	XX	16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	16.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	16.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	
101	XX	16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	
101	XX	16.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	16.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	
101	XX	16.58	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	
101	XX	16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	
101	XX	16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	
101	XX	16.61	Pembinaan SMP Terbuka	
101	XX	16.62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	
101	XX	16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	
101	XX	16.64	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	
101	XX	16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	
101	XX	16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS	
101	XX	16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	
101	XX	16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	
101	XX	16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	
101	XX	16.70	Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa	
101	XX	16.71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	
101	XX	16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	
101	XX	16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	
101	XX	16.74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	
101	XX	16.75	Penyediaan beasiswa transisi	
101	XX	16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	
101	XX	16.77	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil	
101	XX	16.78	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	16.79	Pengadaan Mebeluer Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	16.80	Pengadaan Mebeluer Sekoah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	16.81	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	16.82	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	16.83	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Dasar (SD)	
101	XX	16.84	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat SMP/MTs	
101	XX	16.85	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	16.86	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	17	Program Pendidikan Menengah	
101	XX	17.01	Pembangunan gedung sekolah	
101	XX	17.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	17.03	Penambahan ruang kelas sekolah	
101	XX	17.04	Penambahan ruang guru sekolah	
101	XX	17.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)	
101	XX	17.06	Pembangunan ruang locker siswa	
101	XX	17.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	17.08	Pembangunan ruang serba guna/aula	
101	XX	17.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	17.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	17.11	Pembangunan ruang ibadah	
101	XX	17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	
101	XX	17.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	17.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	17.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
101	XX	17.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	
101	XX	17.17	Pengadaan pakaian olahraga	
101	XX	17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	17.19	Pengadaan mebeluer sekolah	
101	XX	17.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	
101	XX	17.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	
101	XX	17.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah	
101	XX	17.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	
101	XX	17.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	17.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	
101	XX	17.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	
101	XX	17.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa	
101	XX	17.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	17.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula	
101	XX	17.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	17.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	17.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	
101	XX	17.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	
101	XX	17.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	17.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	17.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	
101	XX	17.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	
101	XX	17.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	
101	XX	17.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	

1			2	3
101	XX	17.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
101	XX	17.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	17.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	
101	XX	17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
101	XX	17.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	
101	XX	17.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	
101	XX	17.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	
101	XX	17.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	
101	XX	17.49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	
101	XX	17.50	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	17.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	17.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	
101	XX	17.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	
101	XX	17.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	17.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	17.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah	
101	XX	17.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	
101	XX	17.58	Pelatihan penyusunan kurikulum	
101	XX	17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	
101	XX	17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan; terpencil dan kepulauan	
101	XX	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	
101	XX	17.62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	
101	XX	17.63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	
101	XX	17.64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	
101	XX	17.65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	
101	XX	17.66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	
101	XX	17.67	Penyebarnyaasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	
101	XX	17.68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	
101	XX	17.69	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	17.70	Pendidikan Life Skill SMA/MA	
101	XX	17.71	Magang Peserta Didik di Bidang Pendidikan	
101	XX	17.72	Pengadaan Mebeluer Sekolah Menengah (SMA Sederajat)	
101	XX	17.73	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (SMA Sederajat)	
101	XX	17.74	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat	
101	XX	17.75	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Sederajat)	
101	XX	17.76	Penigkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	
101	XX	17.77	Pengadaan Meubiler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	
101	XX	17.78	Penyusunan AMDAL Pendidikan Menengah	
101	XX	17.79	Pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK	
101	XX	18	Program Pendidikan Non Formal	
101	XX	18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	
101	XX	18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	
101	XX	18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	
101	XX	18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	
101	XX	18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
101	XX	18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	
101	XX	18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	
101	XX	18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	
101	XX	18.09	Pengembangan kurikulum; bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	
101	XX	18.10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	
101	XX	18.11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	
101	XX	18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	
101	XX	18.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	19	Program Pendidikan Luar Biasa	
101	XX	19.01	Pembangunan gedung sekolah	
101	XX	19.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	19.03	Penambahan ruang kelas sekolah	
101	XX	19.04	Penambahan ruang guru sekolah	
101	XX	19.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)	
101	XX	19.06	Pembangunan ruang locker siswa	
101	XX	19.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	19.08	Pembangunan ruang serba guna/aula	
101	XX	19.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	19.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	19.11	Pembangunan ruang ibadah	
101	XX	19.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	
101	XX	19.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	19.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	19.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
101	XX	19.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga	
101	XX	19.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	19.18	Pengadaan mebeluer sekolah	
101	XX	19.19	Pengadaan perlengkapan sekolah	
101	XX	19.20	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	
101	XX	19.21	Pengadaan sarana mobilitas sekolah	
101	XX	19.22	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	
101	XX	19.23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	19.24	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	
101	XX	19.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	

1			2	3
101	XX	19.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa	
101	XX	19.27	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	
101	XX	19.28	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula	
101	XX	19.29	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	19.30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	19.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	
101	XX	19.32	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	
101	XX	19.33	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	19.34	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	19.35	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar	
101	XX	19.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	19.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	
101	XX	19.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	
101	XX	19.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	
101	XX	19.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	
101	XX	19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
101	XX	19.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah	
101	XX	19.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	
101	XX	19.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
101	XX	19.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	
101	XX	19.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	
101	XX	19.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	
101	XX	19.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	
101	XX	19.49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	
101	XX	19.50	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir	
101	XX	19.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	
101	XX	19.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	
101	XX	19.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	
101	XX	19.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan Instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	
101	XX	19.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	
101	XX	19.56	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	
101	XX	19.57	Pelatihan Penyusunan kurikulum	
101	XX	19.58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	
101	XX	19.59	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	19.60	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	
101	XX	19.61	Perlombaan melukis, bernyanyi, menghafal doa dan ayat ayat pendek bagi anak luar biasa pada acara peringatan hari besar nasional dan Islam	
101	XX	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	
101	XX	20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
101	XX	20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	
101	XX	20.05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	
101	XX	20.06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	
101	XX	20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	
101	XX	20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	
101	XX	20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.12	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	20.13	Magang Tenaga Pendidikan	
101	XX	20.14	Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	
101	XX	20.15	Pelatihan Guru Kewirausahaan dan Pengelola Unit Produksi (PUP) SMK	
101	XX	20.16	Pengelolaan Program Keahlian SMK di Kabupaten Siak	
101	XX	20.17	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Guru SD/MI	
101	XX	20.18	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMP/MTs	
101	XX	20.19	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMA/MA/SMK	
101	XX	20.20	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.21	Pembinaan OSN guru SD/MI, SLTP dan SLTA	
101	XX	20.22	Pelatihan KTSP Bagi Pengawas	
101	XX	20.23	Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Melalui Pelatihan Tingkat Dasar (Biaya Pendidik Kelas)(Sharing Propinsi)	
101	XX	20.24	Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam untuk SD Sederajat dan SMP sederajat	
101	XX	20.25	Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam untuk SMA Sederajat	
101	XX	20.26	Diklat Calon Pengawas (Cawas)	
101	XX	20.27	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	
101	XX	20.28	Peningkatan kompetensi pengawas fungsional pendidikan melalui pelatihan profesional kepengawasan dan laporan kinerja unit kerja	
101	XX	20.29	Bimbingan Penulisan Karya Inovasi dan Publikasi Ilmiah	
101	XX	20.30	Pelatihan Guru CPNS (Induksi)	
101	XX	20.31	Mahir Lanjutan Kepramukaan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan	
101	XX	20.32	Pertemuan pembina pramuka siaga, penggalang dan penegak (karang pamitran)	
101	XX	20.33	Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA	
101	XX	20.34	Pelatihan tematik bagi guru SD/MI	
101	XX	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
101	XX	21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	
101	XX	21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	
101	XX	21.03	Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
101	XX	21.04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	
101	XX	21.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	
101	XX	21.06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	

1			2	3
101	XX	21.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	
101	XX	21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	
101	XX	21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	
101	XX	21.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
101	XX	22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	
101	XX	22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	
101	XX	22.03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	
101	XX	22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	
101	XX	22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	
101	XX	22.06	Pembinaan Komite Sekolah	
101	XX	22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	
101	XX	22.08	Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	
101	XX	22.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
101	XX	22.10	Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA	
101	XX	22.11	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas VI SD Khusus Mata Pelajaran UASBN	
101	XX	22.12	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMP/MTs Khusus Mata Pelajaran UNAS	
101	XX	22.13	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI	
101	XX	22.14	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs	
101	XX	22.15	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMA/MA Khusus Mata Pelajaran Unas	
101	XX	22.16	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UN/US SMA/MA/SMK	
101	XX	22.17	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	
101	XX	22.18	Pembuatan Data Base Pendidikan	
101	XX	22.19	Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka	
101	XX	22.20	Penyelenggaraan akreditasi pendidikan	
101	XX	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	
101	XX	23.01	Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kab. Siak	
101	XX	23.02	Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)	
101	XX	24	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan	
101	XX	24.01	Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan	
102			Kesehatan	
102	XX	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	XX	15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	XX	15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	
102	XX	15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	
102	XX	15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	15.07	Sosialisasi Penggunaan Obat yang Rasional dan Penyalahgunaan Obat Terapeutik Masyarakat	
102	XX	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
102	XX	16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	
102	XX	16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	
102	XX	16.03	Pengadaan; peningkatan; dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	
102	XX	16.04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	
102	XX	16.05	Perbaikan gizi masyarakat	
102	XX	16.06	Revitalisasi sistem kesehatan	
102	XX	16.07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	
102	XX	16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	
102	XX	16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	
102	XX	16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	
102	XX	16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	
102	XX	16.12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	
102	XX	16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	
102	XX	16.14	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	16.15	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	
102	XX	16.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	
102	XX	16.17	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	
102	XX	16.18	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Polindes	
102	XX	16.19	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas	
102	XX	16.20	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau	
102	XX	16.21	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis	
102	XX	16.22	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Siak	
102	XX	16.23	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura	
102	XX	16.24	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan	
102	XX	16.25	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang	
102	XX	16.26	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang	
102	XX	16.27	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun	
102	XX	16.28	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam	
102	XX	16.29	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib	
102	XX	16.30	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit	
102	XX	16.31	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya	
102	XX	16.32	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh	
102	XX	16.33	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako	
102	XX	16.34	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reveral Sistem	
102	XX	16.35	Pelayanan Kesehatan pada Event-Event Resmi dan Hari-hari Besar	
102	XX	16.36	Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	

1			2	3
102	XX	16.37	Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Farmasi Kesehatan	
102	XX	16.38	Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas	
102	XX	16.39	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	
102	XX	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
102	XX	17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	
102	XX	17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	
102	XX	17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	
102	XX	17.04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	
102	XX	17.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	
102	XX	18.01	Facilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat	
102	XX	18.02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	
102	XX	18.03	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	
102	XX	18.04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu	
102	XX	18.05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait	
102	XX	18.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
102	XX	19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	
102	XX	19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	
102	XX	19.03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	
102	XX	19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	
102	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	19.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	
102	XX	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
102	XX	20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	
102	XX	20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	
102	XX	20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	
102	XX	20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	
102	XX	20.05	Penanggulangan Gizi-Lebih	
102	XX	20.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	21	Program pengembangan lingkungan sehat	
102	XX	21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	
102	XX	21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	
102	XX	21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	
102	XX	21.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	21.05	Penyehatan Lingkungan	
102	XX	21.06	Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas	
102	XX	21.07	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Sehat	
102	XX	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
102	XX	22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	
102	XX	22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	
102	XX	22.03	Pengadaan vaksin penyakit menular	
102	XX	22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	
102	XX	22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
102	XX	22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	
102	XX	22.07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	
102	XX	22.08	Peningkatan Imunisasi	
102	XX	22.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	
102	XX	22.10	Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	
102	XX	22.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	22.12	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
102	XX	22.13	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
102	XX	22.14	Pengendalian penyakit tidak menular	
102	XX	22.15	Peningkatan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji	
102	XX	22.16	Peningkatan Survelians Epidemiologi dan Kesehatan Matra	
102	XX	22.17	Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS	
102	XX	23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	
102	XX	23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	
102	XX	23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	
102	XX	23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	
102	XX	23.04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	
102	XX	23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	
102	XX	23.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	23.07	Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Puskesmas	
102	XX	23.08	Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum (BLUD)	
102	XX	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	
102	XX	24.01	Pelayanan operasi katarak	
102	XX	24.02	Pelayanan kesehatan THT	
102	XX	24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing	
102	XX	24.04	Pelayanan sunatan masal	
102	XX	24.05	Penanggulangan ISPA	
102	XX	24.06	Penanggulangan penyakit cacangan	
102	XX	24.07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin	

1			2	3
102	XX	24.08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	
102	XX	24.09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu	
102	XX	24.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	25	Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
102	XX	25.01	Pembangunan puskesmas	
102	XX	25.02	Pembangunan puskesmas pembantu	
102	XX	25.03	Pengadaan puskesmas perairan	
102	XX	25.04	Pengadaan puskesmas keliling	
102	XX	25.05	Pembangunan posyandu	
102	XX	25.06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	
102	XX	25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	
102	XX	25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	
102	XX	25.09	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	
102	XX	25.10	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	
102	XX	25.11	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	
102	XX	25.12	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	
102	XX	25.13	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	
102	XX	25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	
102	XX	25.15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan	
102	XX	25.16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	
102	XX	25.17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu	
102	XX	25.18	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	
102	XX	25.19	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	
102	XX	25.20	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	
102	XX	25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan	
102	XX	25.22	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	25.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes	
102	XX	25.24	Rehabilitasi Puskesmas	
102	XX	25.25	Pengadaan Meubeleur Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes	
102	XX	25.26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes dan Poskesdes	
102	XX	25.27	Rehabilitasi Polindes dan Poskesdes	
102	XX	26	Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
102	XX	26.01	Pembangunan rumah sakit	
102	XX	26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	
102	XX	26.03	Pembangunan gudang obat/apotik	
102	XX	26.04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III)	
102	XX	26.05	Pengembangan ruang gawat darurat	
102	XX	26.06	Pengembangan ruang ICU; ICCU; NICU	
102	XX	26.07	Pengembangan ruang operasi	
102	XX	26.08	Pengembangan ruang terapi	
102	XX	26.09	Pengembangan ruang isolasi	
102	XX	26.10	Pengembangan ruang bersalin	
102	XX	26.11	Pengembangan ruang inkubator	
102	XX	26.12	Pengembangan ruang bayi	
102	XX	26.13	Pengembangan ruang rontgen	
102	XX	26.14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit	
102	XX	26.15	Pembangunan kamar jenazah	
102	XX	26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	
102	XX	26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	
102	XX	26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	
102	XX	26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	
102	XX	26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	
102	XX	26.21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	
102	XX	26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)	
102	XX	26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	
102	XX	26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	
102	XX	26.25	Pengembangan tipe rumah sakit	
102	XX	26.26	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	26.27	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Bedah	
102	XX	26.28	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran kebidanan dan internis	
102	XX	26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran neurologi dan akuntupur	
102	XX	26.30	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran radiologi	
102	XX	26.31	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran laboratorium	
102	XX	26.32	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran sterilisasi	
102	XX	26.33	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran anak/perinatologi	
102	XX	26.34	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran THT	
102	XX	26.35	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran Mata	
102	XX	26.36	Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran UGD dan ICU	
102	XX	26.37	Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Gigi	
102	XX	26.38	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Anestesi	
102	XX	26.39	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Paru	
102	XX	26.40	Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Instalasi Gas Medis	
102	XX	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	
102	XX	27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	
102	XX	27.02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	
102	XX	27.03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik	
102	XX	27.04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III)	

1			2	3
102	XX	27.05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat	
102	XX	27.06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU; ICCU; NICU	
102	XX	27.07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	
102	XX	27.08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi	
102	XX	27.09	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi	
102	XX	27.10	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin	
102	XX	27.11	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator	
102	XX	27.12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi	
102	XX	27.13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen	
102	XX	27.14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit	
102	XX	27.15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah	
102	XX	27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	
102	XX	27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	
102	XX	27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	
102	XX	27.19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit	
102	XX	27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	
102	XX	27.21	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
102	XX	28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	
102	XX	28.02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	
102	XX	28.03	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	
102	XX	28.04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	
102	XX	28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	
102	XX	28.06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	
102	XX	28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	
102	XX	28.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	28.09	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)	
102	XX	28.10	Pendampingan dan Penunjang Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
102	XX	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
102	XX	29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	
102	XX	29.02	Immunisasi bagi anak balita	
102	XX	29.03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita	
102	XX	29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	
102	XX	29.05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita	
102	XX	29.06	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita	
102	XX	29.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
102	XX	30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	
102	XX	30.02	Rekrutmen tenaga perawat kesehatan	
102	XX	30.03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	
102	XX	30.04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan	
102	XX	30.05	Pembangunan panti asuhan	
102	XX	30.06	Pelayanan kesehatan	
102	XX	30.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
102	XX	31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	
102	XX	31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	
102	XX	31.03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	
102	XX	31.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
102	XX	31.05	Pengawasan dan Pengendalian Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	
102	XX	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
102	XX	32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	
102	XX	32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	
102	XX	32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	
102	XX	32.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	
102	XX	32.05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	
102	XX	33	Program Pelayanan Kesehatan	
102	XX	33.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	
102	XX	33.02	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin di RSUD	
102	XX	33.03	Penyelenggaraan Klinik VCT	
102	XX	34	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	34.01	Penyusunan standar pelayanan rumah sakit	
102	XX	35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
102	XX	35.01	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	
103			Pekerjaan Umum	
103	XX	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	
103	XX	15.01	Perencanaan pembangunan jalan	
103	XX	15.02	Survei kontur jalan dan jembatan	
103	XX	15.03	Pembangunan jalan	
103	XX	15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	
103	XX	15.05	Pembangunan jembatan	
103	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	15.07	Peningkatan Jalan Siak - Tumang (DAK)	

1			2	3
103	XX	15.08	Peningkatan Jalan Kecamatan Siak	
103	XX	15.09	Pembangunan Jalan Kecamatan Siak	
103	XX	15.10	Peningkatan Jalan Kecamatan Mempura	
103	XX	15.11	Pembangunan Jalan Kecamatan Mempura	
103	XX	15.12	Peningkatan Jalan Kecamatan Pusako	
103	XX	15.13	Pembangunan Jalan Kecamatan Pusako	
103	XX	15.14	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	15.15	Pembangunan Jalan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	15.16	Peningkatan Jalan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	15.17	Pembangunan Jalan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	15.18	Peningkatan Jalan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	15.19	Pembangunan Jalan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	15.20	Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun	
103	XX	15.21	Pembangunan Jalan Kecamatan Dayun	
103	XX	15.22	Peningkatan Jalan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	15.23	Pembangunan Jalan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	15.24	Peningkatan Jalan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	15.25	Pembangunan Jalan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	15.26	Peningkatan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	15.27	Pembangunan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	15.28	Peningkatan Jalan Kecamatan Tualang	
103	XX	15.29	Pembangunan Jalan Kecamatan Tualang	
103	XX	15.30	Peningkatan Jalan Kecamatan Minas	
103	XX	15.31	Pembangunan Jalan Kecamatan Minas	
103	XX	15.32	Peningkatan Jalan Kecamatan Kandis	
103	XX	15.33	Pembangunan Jalan Kecamatan Kandis	
103	XX	15.34	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	15.35	Pembangunan Jalan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	15.36	Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak	
103	XX	15.37	Pembangunan Jembatan Kecamatan Mempura	
103	XX	15.38	Pembangunan Jembatan Kecamatan Pusako	
103	XX	15.39	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	15.40	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	15.41	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	15.42	Pembangunan Jembatan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	15.43	Pembangunan Jembatan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	15.44	Pembangunan Jembatan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	15.45	Pembangunan Jembatan Kecamatan Tualang	
103	XX	15.46	Pembangunan Jembatan Kecamatan Minas	
103	XX	15.47	Pembangunan Jembatan Kecamatan Kandis	
103	XX	15.48	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	15.49	DED Pembangunan Jalan Kabupaten Siak	
103	XX	15.50	DED Pembangunan Jembatan Kabupaten Siak	
103	XX	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
103	XX	16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
103	XX	16.02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong	
103	XX	16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
103	XX	16.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	16.05	Pembangunan Drainase Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
103	XX	16.06	Pembangunan Drainase Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
103	XX	16.07	Pembangunan Drainase Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
103	XX	16.08	Pembangunan Drainase Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
103	XX	17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	
103	XX	17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong	
103	XX	17.02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong	
103	XX	17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	
103	XX	17.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	17.05	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Siak	
103	XX	17.06	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Mempura	
103	XX	17.07	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Bungaraya	
103	XX	17.08	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Tualang	
103	XX	17.09	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	17.10	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	17.11	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	17.12	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Pusako	
103	XX	17.13	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	17.14	Pembangunan Plasa Turap Depan Istana	
103	XX	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
103	XX	18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
103	XX	18.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
103	XX	18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
103	XX	18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
103	XX	18.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	18.06	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Siak	
103	XX	18.07	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Siak	
103	XX	18.08	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Dayun	
103	XX	18.09	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Dayun	
103	XX	18.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Mempura	
103	XX	18.11	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Mempura	

1			2	3
103	XX	18.12	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	18.13	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	18.14	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	18.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	18.16	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	18.17	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	18.18	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Tualang	
103	XX	18.19	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Tualang	
103	XX	18.20	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Pusako	
103	XX	18.21	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Pusako	
103	XX	18.22	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	18.23	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	18.24	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	18.25	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	18.26	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	18.27	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	18.28	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	18.29	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	18.30	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Kandis	
103	XX	18.31	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Kandis	
103	XX	18.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah I	
103	XX	18.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah II	
103	XX	18.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah III	
103	XX	18.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah IV	
103	XX	18.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah V	
103	XX	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
103	XX	19.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
103	XX	19.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	
103	XX	20.01	Inspeksi kondisi jalan	
103	XX	20.02	Inspeksi kondisi jembatan	
103	XX	20.03	Evaluasi dan pelaporan	
103	XX	21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	
103	XX	21.01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	
103	XX	21.02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	
103	XX	21.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
103	XX	22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	
103	XX	22.02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	
103	XX	22.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
103	XX	23.01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan	
103	XX	23.02	Pembangunan gedung workshop	
103	XX	23.03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan	
103	XX	23.04	Pengadaan alat-alat berat	
103	XX	23.05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	
103	XX	23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	
103	XX	23.07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan	
103	XX	23.08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop	
103	XX	23.09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	
103	XX	23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	
103	XX	23.11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	
103	XX	23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	
103	XX	23.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
103	XX	24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	
103	XX	24.02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	
103	XX	24.03	Perencanaan pembangunan reservoir	
103	XX	24.04	Perencanaan pembangunan pintu air	
103	XX	24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	
103	XX	24.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	
103	XX	24.07	Pembangunan reservoir	
103	XX	24.08	Pembangunan pintu air	
103	XX	24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	
103	XX	24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	
103	XX	24.11	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum	
103	XX	24.12	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir	
103	XX	24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	
103	XX	24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	
103	XX	24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
103	XX	24.16	Pemberdayaan petani pemakai air	
103	XX	24.17	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	24.18	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Bungaraya	
103	XX	24.19	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	24.20	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	24.21	Pembuatan bangunan pintu air dan box culvert desa benteng hulu	

1			2	3
103	XX	24.22	Pembangunan jaringan pengairan sistem pompanisasi kecamatan sabak auh (tahap II)	
103	XX	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
103	XX	25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
103	XX	25.02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
103	XX	25.03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
103	XX	25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	
103	XX	25.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	
103	XX	25.06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	
103	XX	25.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	25.08	Pembuatan Embung Untuk Persediaan Air Kabupaten Siak	
103	XX	26	Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
103	XX	26.01	Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya	
103	XX	26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan penampung air lainnya	
103	XX	26.03	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	
103	XX	26.04	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau	
103	XX	26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; danau; dan sumber daya air lainnya	
103	XX	26.06	Peningkatan konservasi air tanah	
103	XX	26.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
103	XX	27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
103	XX	27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	
103	XX	27.03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	
103	XX	27.04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	
103	XX	27.05	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	
103	XX	27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	
103	XX	27.07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	
103	XX	27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	
103	XX	27.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	27.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Air Minum	
103	XX	27.11	Pengadaan sarana dan prasarana air minum	
103	XX	27.12	Peningkatan Pelayanan Air Minum	
103	XX	27.13	Pendidikan dan Pelatihan Personil UPTD SPAM	
103	XX	27.14	Pamsimas Kabupaten Siak	
103	XX	27.15	Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	
103	XX	27.16	Perencanaan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	
103	XX	28	Program Pengendalian Banjir	
103	XX	28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir	
103	XX	28.02	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir	
103	XX	28.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	
103	XX	28.04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	
103	XX	28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	
103	XX	28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
103	XX	28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	
103	XX	28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	
103	XX	28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	
103	XX	28.10	Pembangunan tanggul pemecah ombak	
103	XX	28.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	28.12	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Siak	
103	XX	28.13	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	28.14	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Mempura	
103	XX	28.15	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Tualang	
103	XX	28.16	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	28.17	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	28.18	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Pusako	
103	XX	28.19	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Bungaraya	
103	XX	28.20	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Kandis	
103	XX	28.21	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	28.22	Normalisasi Saluran/Sungai Kabupaten Siak	
103	XX	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
103	XX	29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	
103	XX	29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	
103	XX	29.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	
103	XX	30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	
103	XX	30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	
103	XX	30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
103	XX	30.04	Pembangunan pasar perdesaan	
103	XX	30.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	
103	XX	30.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
103	XX	30.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan	
103	XX	30.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	30.09	Dana Pendampingan RIS-PNPM, Pendampingan PPIP dan Biaya Operasional PPSP Kab. Siak	
104			Perumahan	
104	XX	15	Program Pengembangan Perumahan	
104	XX	15.01	Penetapan kebijakan; strategi; dan program perumahan	

1			2	3
104	XX	15.02	Penyusunan Norma; Standar; Pedoman; dan Manual (NSPM)	
104	XX	15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	
104	XX	15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	
104	XX	15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	
104	XX	15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
104	XX	15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	
104	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
104	XX	15.09	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya) (Swakelola)	
104	XX	15.10	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib) (Swakelola)	
104	XX	15.11	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang) (Swakelola)	
104	XX	15.12	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau) (Swakelola)	
104	XX	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
104	XX	16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	
104	XX	16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	
104	XX	16.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	
104	XX	16.04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	
104	XX	16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	
104	XX	16.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
104	XX	16.07	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
104	XX	16.08	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
104	XX	16.09	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
104	XX	16.10	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
104	XX	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
104	XX	17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	
104	XX	17.02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	
104	XX	17.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	
104	XX	17.04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah	
104	XX	17.05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum	
104	XX	17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	
104	XX	17.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
104	XX	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
104	XX	18.01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	
104	XX	18.02	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	
104	XX	18.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
104	XX	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.01	Penyusunan norma; standar; prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.02	Sosialisasi norma; standar; prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.03	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	
104	XX	19.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	
104	XX	19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	
104	XX	19.06	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran.	
104	XX	19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	
104	XX	19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	
104	XX	19.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
104	XX	19.14	Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
104	XX	19.15	Peringatan HUT Pemadam Kebakaran/Rakornas Damkar	
104	XX	20	Program pengelolaan areal pemakaman	
104	XX	20.01	Penyusunan kebijakan; norma; standar; prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman	
104	XX	20.02	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	
104	XX	20.03	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman	
104	XX	20.04	Koordinasi penataan areal pemakaman	
104	XX	20.05	Pemberian perijinan pemakaman	
104	XX	20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	
104	XX	20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	
104	XX	20.08	Monitoring dan evaluasi	
105			Penataan Ruang	
105	XX	15	Program Perencanaan Tata Ruang	
105	XX	15.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	
105	XX	15.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK; RTRK; dan RTBL	
105	XX	15.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	
105	XX	15.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	
105	XX	15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	
105	XX	15.06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	
105	XX	15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	
105	XX	15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	
105	XX	15.09	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	
105	XX	15.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
105	XX	15.11	Revisi rencana tata ruang	
105	XX	15.12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	

1			2	3
105	XX	15.13	Survey dan pemetaan	
105	XX	15.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	
105	XX	15.15	Monitoring; evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	
105	XX	15.16	Review RTRW Kabupaten Siak	
105	XX	15.17	Study Pemanfaatan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil	
105	XX	16	Program Pemanfaatan Ruang	
105	XX	16.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	
105	XX	16.02	Penyusunan norma; standar; dan kriteria pemanfaatan ruang	
105	XX	16.03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	16.04	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	
105	XX	16.05	Survey dan pemetaan	
105	XX	16.06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	
105	XX	16.07	Sosialisasi kebijakan; norma; standar; prosedur dan manual pemanfaatan ruang	
105	XX	16.08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	
105	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	
105	XX	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
105	XX	17.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	17.02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	17.03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	17.04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	17.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	
105	XX	17.06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	
105	XX	17.07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
105	XX	17.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
105	XX	17.09	Pengadaan Sarana Publikasi	
106	XX	15	Perencanaan Pembangunan	
106	XX	15	Program pengembangan data/informasi	
106	XX	15.01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	
106	XX	15.02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	
106	XX	15.03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	
106	XX	15.04	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	
106	XX	15.05	Penyusunan profile daerah	
106	XX	15.06	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi spasial	
106	XX	15.07	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	
106	XX	16	Program kerjasama pembangunan	
106	XX	16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	
106	XX	16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara	
106	XX	16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	
106	XX	16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	
106	XX	16.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	16.06	Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	
106	XX	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
106	XX	17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	
106	XX	17.02	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara	
106	XX	17.03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	
106	XX	17.04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	
106	XX	17.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
106	XX	18.01	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
106	XX	18.02	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	
106	XX	18.03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
106	XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
106	XX	19.01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan	
106	XX	19.02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	
106	XX	19.03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	
106	XX	19.04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	
106	XX	19.05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	
106	XX	19.06	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan	
106	XX	19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	
106	XX	19.08	Koordinasi perencanaan penanganan perkotaan	
106	XX	19.09	Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan	
106	XX	19.10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	
106	XX	19.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
106	XX	20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	
106	XX	20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	
106	XX	20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	
106	XX	20.04	Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
106	XX	21	Program perencanaan pembangunan daerah	
106	XX	21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	
106	XX	21.02	Penyusunan rancangan RPJPD	
106	XX	21.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	

1			2	3
106	XX	21.04	Penetapan RPJPD	
106	XX	21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	
106	XX	21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	
106	XX	21.07	Penetapan RPJMD	
106	XX	21.08	Penyusunan rancangan RKPD	
106	XX	21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
106	XX	21.10	Penetapan RKPD	
106	XX	21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
106	XX	21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
106	XX	21.13	Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
106	XX	21.14	Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah	
106	XX	21.15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)	
106	XX	21.16	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	
106	XX	21.17	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 tahun	
106	XX	21.18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
106	XX	21.19	Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)	
106	XX	21.20	Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
106	XX	21.21	Penyusunan Renstra SKPD	
106	XX	21.22	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan Pembangunan Daerah	
106	XX	21.23	Pengadaan Sistem Informasi Terintegrasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
106	XX	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	
106	XX	22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	
106	XX	22.02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	
106	XX	22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	
106	XX	22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
106	XX	22.05	Penyusunan tabel input output daerah	
106	XX	22.06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	
106	XX	22.07	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	
106	XX	22.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	22.09	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak	
106	XX	22.10	Study Pengembangan kawasan pertanian holtikultura	
106	XX	22.11	Kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat	
106	XX	22.12	Kajian pengembangan tanaman sagu rakyat daerah pesisir kabupaten siak	
106	XX	22.13	Survey perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	
106	XX	23	Program perencanaan sosial dan budaya	
106	XX	23.01	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi	
106	XX	23.02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	
106	XX	23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	
106	XX	23.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	23.05	Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak	
106	XX	23.06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	
106	XX	23.07	Studi kelayakan pendirian unit rumah sakit baru di kabupaten siak	
106	XX	23.08	Kajian peningkatan dan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	
106	XX	23.09	Survey perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	
106	XX	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
106	XX	24.01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	
106	XX	24.02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	
106	XX	24.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
106	XX	24.04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum	
106	XX	24.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
106	XX	24.06	Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak	
106	XX	24.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan MP3EI	
106	XX	24.08	Review RUKD Kabupaten Siak	
106	XX	24.09	Survey perencanaan pembngunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
106	XX	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	
106	XX	25.01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	
106	XX	25.02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	
106	XX	25.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
107			Perhubungan	
107	XX	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
107	XX	15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
107	XX	15.02	Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan	
107	XX	15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
107	XX	15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	
107	XX	15.05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	
107	XX	15.06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai; danau dan penyeberangan	
107	XX	15.07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	
107	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
107	XX	15.09	Penyusunan Dokumen Amdal	
107	XX	15.10	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Kabupaten Siak	
107	XX	15.11	Perencanaan Keselamatan Bidang Transportasi Jalan	
107	XX	15.12	Perencanaan Studi Kelayakan Terminal	
107	XX	15.13	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Buton	
107	XX	15.14	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Siak	
107	XX	15.15	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Buatn	
107	XX	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	

1			2	3
107	XX	16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	
107	XX	16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	
107	XX	16.03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang	
107	XX	16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	
107	XX	16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	
107	XX	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	
107	XX	17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	
107	XX	17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	
107	XX	17.03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.	
107	XX	17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	
107	XX	17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	
107	XX	17.06	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal.	
107	XX	17.07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	
107	XX	17.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	
107	XX	17.09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal.	
107	XX	17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat; tepat; murah dan mudah	
107	XX	17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	
107	XX	17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
107	XX	17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	
107	XX	17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	
107	XX	17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	
107	XX	17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	
107	XX	17.17	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
107	XX	17.18	Koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	
107	XX	17.19	Koordinasi penilaian kota tertib lalu lintas	
107	XX	17.20	Pengoperasian dan pemeliharaan bus sekolah dan angkutan umum	
107	XX	18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
107	XX	18.01	Pembangunan gedung terminal	
107	XX	18.02	Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal	
107	XX	18.03	Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal	
107	XX	18.04	Pembangunan Taman Lalu Lintas	
107	XX	18.05	Pembangunan Dermaga Penyeberangan	
107	XX	18.06	Pembangunan Pelabuhan Siak	
107	XX	18.07	Pembangunan Pelabuhan Rakyat	
107	XX	18.08	Pembangunan dermaga penyeberangan Ro-Ro	
107	XX	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
107	XX	19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	
107	XX	19.02	Pengadaan marka jalan	
107	XX	19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan	
107	XX	19.04	Penunjang operasional kegiatan pemerintah daerah	
107	XX	19.05	Pemanduan pejabat dan tamu-tamu daerah	
107	XX	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	
107	XX	20.01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	
107	XX	20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	
107	XX	20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	
108			Lingkungan Hidup	
108	XX	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
108	XX	15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	
108	XX	15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	
108	XX	15.03	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	
108	XX	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
108	XX	15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	
108	XX	15.06	Bimbingan teknis persampahan	
108	XX	15.07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	
108	XX	15.08	Kerjasama pengelolaan sampah	
108	XX	15.09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	
108	XX	15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	
108	XX	15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
108	XX	15.12	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	15.13	Pembangunan TPA Tualang	
108	XX	15.14	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA Kabupaten Siak	
108	XX	15.15	Pembangunan/Peningkatan TPA Kabupaten Siak	
108	XX	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
108	XX	16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	
108	XX	16.02	Koordinasi penilaian langit biru	
108	XX	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	
108	XX	16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	
108	XX	16.05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	
108	XX	16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
108	XX	16.07	Pengkajian dampak lingkungan	
108	XX	16.08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	
108	XX	16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	
108	XX	16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	
108	XX	16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	
108	XX	16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
108	XX	16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	

1			2	3
108	XX	16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	
108	XX	16.15	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif	
108	XX	16.16	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	16.17	Kegiatan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	
108	XX	16.18	Kegiatan Penilaian AMDAL	
108	XX	16.19	Kegiatan Pengawasan AMDAL	
108	XX	16.20	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	
108	XX	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
108	XX	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	
108	XX	17.02	Pantai dan Laut Lestari	
108	XX	17.03	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut; Suaka Perikanan; dan Keanekaragaman Hayati Laut	
108	XX	17.04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	
108	XX	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	
108	XX	17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	
108	XX	17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	
108	XX	17.08	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	
108	XX	17.09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	
108	XX	17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	
108	XX	17.11	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut	
108	XX	17.12	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional	
108	XX	17.13	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan	
108	XX	17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	
108	XX	17.15	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	
108	XX	17.16	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	17.17	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Kerusakan Ekosistem Gambut	
108	XX	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
108	XX	18.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk	
108	XX	18.02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	
108	XX	18.03	Rehabilitasi hutan dan lahan	
108	XX	18.04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	
108	XX	18.05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang; mangrove; dan padang lamun	
108	XX	18.06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang; mangrove; dan padang lamun	
108	XX	18.07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
108	XX	18.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
108	XX	19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	
108	XX	19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	
108	XX	19.03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	
108	XX	19.04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	
108	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	19.06	Pekan lingkungan hidup Indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup	
108	XX	19.07	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	
108	XX	20	Program peningkatan pengendalian polusi	
108	XX	20.01	Pengujian emisi kendaraan bermotor	
108	XX	20.02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	
108	XX	20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	
108	XX	20.04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	
108	XX	20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	
108	XX	20.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	
108	XX	21.01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi	
108	XX	21.02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata	
108	XX	21.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	22	Program pengendalian kebakaran hutan	
108	XX	22.01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	
108	XX	22.02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan	
108	XX	22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	
108	XX	22.04	Penyusunan norma; standar; prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan	
108	XX	22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	
108	XX	22.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
108	XX	23	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	
108	XX	23.01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	
108	XX	23.02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut	
108	XX	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
108	XX	24.01	Penyusunan kebijakan; norma; standard; prosedur dan manual pengelolaan RTH	
108	XX	24.02	Sosialisasi kebijakan; norma; standard; prosedur dan manual pengelolaan RTH	
108	XX	24.03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	
108	XX	24.04	Penyusunan program pengembangan RTH	
108	XX	24.05	Penataan RTH	
108	XX	24.06	Pemeliharaan RTH	
108	XX	24.07	Pengembangan taman rekreasi	
108	XX	24.08	Pengawasan dan pengendalian RTH	
108	XX	24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	

1			2	3
108	XX	24.10	Monitoring dan evaluasi	
108	XX	24.11	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Siak	
108	XX	24.12	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Mempura	
108	XX	24.13	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Tualang	
109			Pertanahan	
109	XX	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	
109	XX	15.01	Penyusunan sistem pendaftaran tanah	
109	XX	15.02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	
109	XX	16	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	
109	XX	16.01	Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	
109	XX	16.02	Penyuluhan hukum pertanahan	
109	XX	16.03	Evaluasi Batas HGU Perusahaan di Kabupaten Siak	
109	XX	16.04	Pengukuran/Pengusulan Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda	
109	XX	16.05	Informasi Tanah Desa	
109	XX	16.06	Inventarisasi Lahan Pangan Berkelanjutan	
109	XX	16.07	Sertifikasi Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	
109	XX	16.08	Sertifikasi Lahan Pangan Berkelanjutan	
109	XX	16.09	Identifikasi, inventarisasi dan pengusulan pembuatan sertifikat tanah pemda kab. siak	
109	XX	16.10	Informasi tanah desa di Kecamatan Koto Gasib	
109	XX	16.11	Informasi tanah desa di Kecamatan Bungaraya	
109	XX	16.12	Informasi tanah desa di Kecamatan Siak	
109	XX	16.13	Informasi tanah desa di Kecamatan Tualang	
109	XX	16.14	Informasi tanah desa di Kecamatan Sabak Auh	
109	XX	16.15	Informasi tanah desa di Kecamatan Lubuk Dalam	
109	XX	16.16	Informasi tanah desa di Kecamatan Pusako	
109	XX	16.17	Informasi tanah desa di Kecamatan Mempura	
109	XX	16.18	Informasi tanah desa di Kecamatan Dayun	
109	XX	16.19	Sertifikasi lahan pangan berkelanjutan (sawah) di Kabupaten Siak	
109	XX	16.20	Inventarisasi lahan pangan berkelanjutan (sawah) di Kabupaten Siak	
109	XX	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
109	XX	1.701	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
109	XX	18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	
109	XX	18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	
109	XX	18.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program Pengolahan Data GPS Berbasis SIG bagi Aparatur SKPD,Kecamatan, dan Desa	
109	XX	18.03	Peningkatan Kemampuan Materi Teknis Aparatur Pengukuran Pemetaan dan SIG Bagian Pertanahan Setda Kab. Siak	
109	XX	18.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi Pertanahan	
109	XX	18.05	Identifikasi, inventarisasi nama unsur rupabumi di Kabupaten Siak	
109	XX	18.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program GPS bagi Aparatur SKPD,Kecamatan, dan Desa se Kabupaten Siak	
109	XX	18.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program pengolahan data untuk aparatur desa dan kelurahan kabupaten siak	
109	XX	18.08	Peningkatan perawatan dan pemeliharaan tugu batas di kecamatan siak dan kecamatan bungaraya	
109	XX	18.09	Peningkatan perawatan dan pemeliharaan tugu batas di kecamatan siak dan kecamatan sungai mandau	
109	XX	18.10	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	
109	XX	19	Program batas wilayah pemerintahan	
109	XX	19.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	
110			Kependudukan dan Catatan Sipil	
110	XX	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
110	XX	15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	
110	XX	15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	
110	XX	15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun; updating dan pemeliharaan)	
110	XX	15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	
110	XX	15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	
110	XX	15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	
110	XX	15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	
110	XX	15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
110	XX	15.09	Pengembangan data base kependudukan	
110	XX	15.10	Penyusunan kebijakan kependudukan	
110	XX	15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	
110	XX	15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	
110	XX	15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	
110	XX	15.14	Penataan dan Pengelolaan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak	
110	XX	15.15	Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Itsbat	
110	XX	15.16	Pelayanan KTP_el Keliling (Masyarakat dan Sekolah)	
110	XX	15.17	Pengembangan Database Kependudukan	
110	XX	15.18	Pembuatan dan Cetak Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
110	XX	15.19	Penataan Jaringan Informatika dan Teknologi Kependudukan	
110	XX	15.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Siak dan e-KTP	
111			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
111	XX	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
111	XX	15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	
111	XX	15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	
111	XX	15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
111	XX	15.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	

1			2	3
111	XX	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
111	XX	16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	
111	XX	16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	
111	XX	16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	
111	XX	16.04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	
111	XX	16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
111	XX	16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
111	XX	16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	
111	XX	16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	
111	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
111	XX	16.10	Fasilitasi Forum Anak	
111	XX	16.11	Kajian tingkat kekerasan anak di Kabupaten Siak	
111	XX	16.12	Operasional dan Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	
111	XX	16.13	Pelatihan TOT PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)	
111	XX	16.14	Profil Anak Kabupaten Siak	
111	XX	16.15	Profil Perempuan Kabupaten Siak	
111	XX	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
111	XX	17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	
111	XX	17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	
111	XX	17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	
111	XX	17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	
111	XX	17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	
111	XX	17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	
111	XX	17.07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat	
111	XX	17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	
111	XX	17.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
111	XX	17.10	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Lansia	
111	XX	17.11	Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	
111	XX	17.12	Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak	
111	XX	17.13	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	
111	XX	17.14	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (PHI)	
111	XX	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
111	XX	18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	
111	XX	18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	
111	XX	18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.	
111	XX	18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.	
111	XX	18.05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	
111	XX	18.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
111	XX	18.07	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsip Gender (PPRG)	
111	XX	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
111	XX	19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	
111	XX	19.02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	
111	XX	20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	
111	XX	20.01	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	
111	XX	20.02	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional	
111	XX	20.03	Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak	
111	XX	20.04	Pelatihan TOT (Taining of Trainer)	
111	XX	20.05	Pengembangan Minat Bakat Anak	
111	XX	20.06	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
112			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
112	XX	15	Program Keluarga Berencana	
112	XX	15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	
112	XX	15.02	Pelayanan KIE	
112	XX	15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	
112	XX	15.04	Promosi Pelayanan Khiba	
112	XX	15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	
112	XX	15.06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	
112	XX	15.07	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Momen Khusus	
112	XX	15.08	Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga	
112	XX	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
112	XX	16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	
112	XX	16.02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	
112	XX	16.03	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi Remaja (Pembinaan Kelompok PIK - KRR)	
112	XX	17	Program pelayanan kontrasepsi	
112	XX	17.01	Pelayanan konseling KB	
112	XX	17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	
112	XX	17.03	Pengadaan alat kontrasepsi	
112	XX	17.04	Pelayanan KB medis operasi	
112	XX	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
112	XX	18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	
112	XX	18.02	Orientasi Pendapatan Keluarga	
112	XX	18.03	Penyediaan Data Keluarga	
112	XX	19	Program promosi kesehatan ibu; bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	

1			2	3
112	XX	19.01	Penyuluhan kesehatan ibu; bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	
112	XX	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
112	XX	20.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	
112	XX	20.02	Facilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	
112	XX	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS	
112	XX	21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	
112	XX	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
112	XX	22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
112	XX	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	
112	XX	23.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	
112	XX	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
112	XX	24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
112	XX	24.02	Pembinaan dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
113			Sosial	
113	XX	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
113	XX	15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
113	XX	15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	
113	XX	15.03	Facilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	
113	XX	15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	
113	XX	15.05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	
113	XX	15.06	Peningkatan Kesejahteraan PMKS	
113	XX	15.07	Identifikasi dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS	
113	XX	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
113	XX	16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	
113	XX	16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak	
113	XX	16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
113	XX	16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat; dan anak nakal	
113	XX	16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	
113	XX	16.06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	
113	XX	16.07	Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana bagi lanjut usia	
113	XX	16.08	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat dan Eks Ttrauma	
113	XX	16.09	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	
113	XX	16.10	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi WRSE dan Psikotik	
113	XX	16.11	Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	
113	XX	17	Program pembinaan anak terlantar	
113	XX	17.01	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	
113	XX	17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	
113	XX	17.03	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	
113	XX	17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	
113	XX	17.05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	
113	XX	17.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
113	XX	17.07	Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak	
113	XX	17.08	Pelayanan kesejahteraan sosial anak	
113	XX	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
113	XX	18.01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	
113	XX	18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	
113	XX	18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	
113	XX	18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	
113	XX	18.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	
113	XX	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	
113	XX	19.01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	
113	XX	19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	
113	XX	19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	
113	XX	19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	
113	XX	19.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	
113	XX	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
113	XX	20.01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	
113	XX	20.02	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial	
113	XX	20.03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	
113	XX	20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	
113	XX	20.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
113	XX	20.06	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan	
113	XX	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
113	XX	21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	
113	XX	21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	
113	XX	21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	
113	XX	21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	

1			2	3
113	XX	21.05	Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional	
113	XX	21.06	Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
113	XX	22	Program pembangunan makam pahlawan	
113	XX	22.01	Pembangunan taman makam pahlawan	
113	XX	23	Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial	
113	XX	23.01	Asuransi kesejahteraan sosial (ASKESSOS)	
113	XX	23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
113	XX	23.03	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	
113	XX	23.04	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
113	XX	23.05	Buffer Stock dan Penyelenggaraan Penyaluran Bansos	
113	XX	24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
113	XX	24.01	Penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi	
113	XX	24.02	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	
113	XX	24.03	Pengembangan pusdalops	
113	XX	24.04	Penyediaan barang-barang logistik BPBD	
113	XX	25	Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	
113	XX	25.01	Pelatihan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	
113	XX	25.02	Inventarisasi kerusakan fisik dan kerugian sosial ekonomi masyarakat pasca bencana	
113	XX	25.03	Rekonstruksi/rehabilitasi sosial ekonomi masyarakat korban bencana	
113	XX	26	Program Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana	
113	XX	26.01	Bulan Peringatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	
113	XX	26.02	Pemetaan resiko bencana	
113	XX	26.03	Pelatihan penanggulangan dan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan)	
113	XX	26.04	Facilitasi operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan bencana	
113	XX	26.05	Facilitasi rumah sakit/sekolah aman bencana	
113	XX	26.06	Bimtek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi	
113	XX	26.07	Facilitasi desa siaga/tangguh bencana	
113	XX	26.08	Penyusunan rekon SOP penanggulangan bencana	
113	XX	27	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	PENAMBAHAN
113	XX	27.01	Pembinaan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial	PENAMBAHAN
113	XX	27.02	Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan	PENAMBAHAN
114			Ketenagakerjaan	
114	XX	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
114	XX	15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah.	
114	XX	15.02	Pembangunan balai latihan kerja	
114	XX	15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	
114	XX	15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	
114	XX	15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	
114	XX	15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	
114	XX	15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	
114	XX	15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	
114	XX	15.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
114	XX	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
114	XX	16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
114	XX	16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
114	XX	16.03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	
114	XX	16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	
114	XX	16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
114	XX	16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
114	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
114	XX	16.08	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Terlatih dan Terampil	
114	XX	16.09	Pelatihan Karyawan yang akan Pensiun	
114	XX	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
114	XX	17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	
114	XX	17.02	Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
114	XX	17.03	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	
114	XX	17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	
114	XX	17.05	Peningkatan pengawasan; perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	
114	XX	17.06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	
114	XX	17.07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	
114	XX	17.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
114	XX	17.09	Pelatihan Tatacara penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kab/Kota/LKS Tripartit	
114	XX	17.10	Bimbingan Teknis Syarat-Syarat Kerja	
114	XX	17.11	Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan	
114	XX	17.12	Bimtek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	
114	XX	17.13	Pelaksanaan dan Penguatan Fungsi LKSTripartit	
114	XX	17.14	Sosialisasi standar pengupahan minimal daerah	
114	XX	17.15	Pelaksanaan verifikasi dan pembinaan serikat pekerja / serikat buruh se - Kabupaten Siak	
114	XX	17.16	Survey Data Kehidupan layak	
114	XX	17.17	Penyusunan dan penerapan sistem pengupahan untuk penetapan upah minimum (UMK) Kab. Siak	
114	XX	17.18	Bimbingan Teknis Norma Kerja	
115			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

1			2	3
115	XX	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	
115	XX	15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.04	Pendirian unit penanganan pengaduan	
115	XX	15.05	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional	
115	XX	15.06	Perencanaan; koordinasi; dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.09	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.10	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah	
115	XX	15.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
115	XX	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
115	XX	16.01	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	
115	XX	16.02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing	
115	XX	16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	16.04	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	
115	XX	16.05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	
115	XX	16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
115	XX	16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	
115	XX	16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	16.09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	16.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
115	XX	16.11	Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga Batik Siak	
115	XX	16.12	Iventarisasi Perkembangan UMKM Kabupaten Siak	
115	XX	16.13	Promosi Komoditi Unggulan Daerah	
115	XX	16.14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah	
115	XX	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	
115	XX	17.02	Pengembangan klaster bisnis	
115	XX	17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	
115	XX	17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	
115	XX	17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga; industri kecil dan industri menengah	
115	XX	17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
115	XX	17.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	
115	XX	17.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
115	XX	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
115	XX	18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	
115	XX	18.02	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	
115	XX	18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	
115	XX	18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	
115	XX	18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	
115	XX	18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	
115	XX	18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	
115	XX	18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	
115	XX	18.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
115	XX	18.10	Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akuntansi Koperasi Sistem Komputerisasi Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi	
115	XX	18.11	Pengembangan Desa Koperasi	
115	XX	18.12	Pameran Produk Unggulan Koperasi	
116			Penanaman Modal	
116	XX	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
116	XX	15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	
116	XX	15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	
116	XX	15.03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	
116	XX	15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	
116	XX	15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	
116	XX	15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	
116	XX	15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	
116	XX	15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
116	XX	15.09	Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	
116	XX	15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	
116	XX	15.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
116	XX	15.12	Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Luar Negeri	
116	XX	15.13	Road Show/Temu Bisnis	
116	XX	15.14	Updating Website Pendukung Investasi	
116	XX	15.15	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	
116	XX	15.16	Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah	
116	XX	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
116	XX	16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	
116	XX	16.02	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	
116	XX	16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	
116	XX	16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	
116	XX	16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	

1			2	3
116	XX	16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	
116	XX	16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	
116	XX	16.08	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal	
116	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
116	XX	16.10	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	
116	XX	16.11	Penyusunan dan Perbanyak Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	
116	XX	16.12	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur; leaflet; buku petunjuk)	
116	XX	16.13	Operasional Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan	
116	XX	16.14	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan (Buku Profil BPMP2T, CD Profil BPMP2T)	
116	XX	16.15	Survey Perizinan	
116	XX	16.16	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	
116	XX	16.17	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-undangan	
116	XX	16.18	Penyusunan Database PMA/PMDN	
116	XX	17	Program penyiapan potensi sumberdaya; sarana dan prasarana daerah	
116	XX	17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	
117			Kebudayaan	
117	XX	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	
117	XX	15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	
117	XX	15.02	Penatagunaan naskah kuno nusantara	
117	XX	15.03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	
117	XX	15.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	
117	XX	15.05	Pemberian dukungan; penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	
117	XX	15.06	Penggandaan buku muatan lokal budaya melayu	
117	XX	15.07	Dukungan pelaksanaan kegiatan kemah budaya nasional	
117	XX	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
117	XX	16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	
117	XX	16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	
117	XX	16.03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	
117	XX	16.04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	
117	XX	16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air	
117	XX	16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	
117	XX	16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	
117	XX	16.08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	
117	XX	16.09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	
117	XX	16.10	Pengawasan; Monitoring; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	
117	XX	16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	
117	XX	16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	
117	XX	16.13	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	
117	XX	16.14	Pengelolaan / Pelindungan Benda-Benda Cagar Budaya	
117	XX	16.15	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum & peninggalan bawah air (Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Bangunan Balai Kerapatan Tinggi Siak)	
117	XX	16.16	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	
117	XX	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
117	XX	17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
117	XX	17.02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	
117	XX	17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	
117	XX	17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	
117	XX	17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	
117	XX	17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	
117	XX	17.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	
117	XX	17.08	Napak Tilas Jelajah Sejarah Bersepeda	
117	XX	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	
117	XX	18.01	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	
117	XX	18.02	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	
117	XX	18.03	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	
117	XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
117	XX	19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	
117	XX	19.01	Pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu	
117	XX	19.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kebudayaan	
118			Kepemudaan dan Olah Raga	
118	XX	15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	
118	XX	15.01	Pendataan potensi kepemudaan	
118	XX	15.02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	
118	XX	15.03	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	
118	XX	15.04	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	
118	XX	15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	
118	XX	15.06	Penyusunan pedoman komunikasi; informasi; edukasi; dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	
118	XX	15.07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	
118	XX	15.08	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	
118	XX	15.09	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	
118	XX	15.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
118	XX	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
118	XX	16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	
118	XX	16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	

1			2	3
118	XX	16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	
118	XX	16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	
118	XX	16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	
118	XX	16.06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	
118	XX	16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	
118	XX	16.08	Pameran prestasi hasil karya pemuda	
118	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
118	XX	16.10	Pengadaan peralatan kesenian	
118	XX	16.11	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibaraka setiap 17 Agustus	
118	XX	16.12	Pelatihan marchingband Kab. Siak	
118	XX	16.13	Pelatihan orkestra kab. Siak	
118	XX	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
118	XX	17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	
118	XX	17.02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	
118	XX	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	
118	XX	18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	
118	XX	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	
118	XX	19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	
118	XX	19.02	Pengembangan sistem sertifikasi dan standardisasi profesi	
118	XX	19.03	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu	
118	XX	19.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	
118	XX	19.05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	
118	XX	19.06	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	
118	XX	19.07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga	
118	XX	19.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
118	XX	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	
118	XX	20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	
118	XX	20.02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	
118	XX	20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	
118	XX	20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	
118	XX	20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	
118	XX	20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	
118	XX	20.07	Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat	
118	XX	20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	
118	XX	20.09	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	
118	XX	20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	
118	XX	20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	
118	XX	20.12	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet; pelatih; dan teknisi olahraga	
118	XX	20.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih; peneliti; praktisi; dan teknisi olahraga	
118	XX	20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	
118	XX	20.15	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	
118	XX	20.16	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga	
118	XX	20.17	Pembibitan dan pembinaan olahraga Sepak Takraw	
118	XX	20.18	Kejuaraan BMX	
118	XX	20.19	Penyelenggaraan Event Tour De Siak	
118	XX	20.20	Penyelenggaraan Event Sepatu Roda	
118	XX	20.21	POPDA Prov. Riau	
118	XX	20.22	Kejurda Tingkat Pelajar	
118	XX	20.23	Penyelenggaraan POPDA Kab. Siak	
118	XX	20.24	Festival permainan rakyat tradisional	
118	XX	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	
118	XX	21.01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
118	XX	21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	
118	XX	21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
118	XX	21.04	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	
118	XX	21.05	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	
118	XX	21.06	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	
118	XX	21.07	Rehab Sedang/Berat Stadion Mini	
118	XX	21.08	Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)	
119			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
119	XX	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
119	XX	15.01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	
119	XX	15.02	Pembangunan pos jaga/ronda	
119	XX	15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	
119	XX	15.04	Pengendalian kebisingan; dan gangguan dari kegiatan masyarakat	
119	XX	15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	
119	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
119	XX	15.07	Pelatihan Dasar Tenaga Linmas Kabupaten Siak	
119	XX	15.08	Lingkungan Tertib Belajar Kabupaten Siak (LTBKS)	
119	XX	15.09	Operasionalisasi komunitas intelijen daerah	
119	XX	15.10	Penyiapan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
119	XX	15.11	Operasional Tim terpadu gangguan keamanan	
119	XX	15.12	Pelatihan Pencegahan di dalam rangka penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban masyarakat	
119	XX	15.13	Tim monitoring kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
119	XX	15.14	Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	

1			2	3
119	XX	15.15	Orientasi Manajemen Linmas	PENAMBAHAN
119	XX	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
119	XX	16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	
119	XX	16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	
119	XX	16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	
119	XX	16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	
119	XX	16.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
119	XX	16.06	Pengawasan Dan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah	
119	XX	16.07	Operasional Tim Yustisi Kabupaten Siak	
119	XX	16.08	Operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Siak	
119	XX	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	
119	XX	17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	
119	XX	17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	
119	XX	17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	
119	XX	17.04	Pembangunan Mushola Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kab. Siak	
119	XX	17.05	Pembangunan Mesjid Raya Kec. Minas	
119	XX	17.06	Pembangunan Mesjid Raya Kec. Lubuk Dalam	
119	XX	17.07	Pembangunan Mesjid Benteng Hilir	
119	XX	17.08	Pemeliharaan Sarana Ibadah di Kabupaten Siak	
119	XX	17.09	Sosialisasi empat pilar Kebangsaan	
119	XX	17.10	Pelatihan dasar bela negara	
119	XX	17.11	Sosialisasi nilai kebangsaan	
119	XX	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
119	XX	18.01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	
119	XX	18.02	Seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	
119	XX	18.03	Pentas seni dan budaya; festival; lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	
119	XX	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
119	XX	19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	
119	XX	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
119	XX	20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	
119	XX	20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	
119	XX	20.03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu	
119	XX	20.04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	
119	XX	20.05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan	
119	XX	20.06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	
119	XX	20.07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur	
119	XX	20.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
119	XX	21	Program pendidikan politik masyarakat	
119	XX	21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	
119	XX	21.02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	
119	XX	21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	
119	XX	21.04	Penyusunan data base partai politik	
119	XX	21.05	Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik	
119	XX	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
119	XX	22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
119	XX	22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	
119	XX	22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	
119	XX	22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	
120			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
120	XX	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
120	XX	15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	
120	XX	15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	
120	XX	15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	
120	XX	15.04	Rapat-rapat paripurna	
120	XX	15.05	Kegiatan Reses	
120	XX	15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	
120	XX	15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	
120	XX	15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
120	XX	15.09	Pembentukan Desa Adat	
120	XX	15.10	Badan Legislasi DPRD Kabupaten Siak	
120	XX	15.11	Pelaksanaan Tugas-tugas Keprotokoleran DPRD Kabupaten Siak	
120	XX	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
120	XX	16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.	
120	XX	16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	
120	XX	16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	
120	XX	16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	
120	XX	16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	
120	XX	16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	
120	XX	16.07	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	
120	XX	16.08	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)	
120	XX	16.09	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

1			2	3
120	XX	16.10	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	
120	XX	16.11	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	
120	XX	16.12	Fasilitasi Kerjasama Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Siak	
120	XX	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
120	XX	17.01	Penyusunan analisa standar belanja	
120	XX	17.02	Penyusunan standar satuan harga	
120	XX	17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	
120	XX	17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	
120	XX	17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	
120	XX	17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	
120	XX	17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	
120	XX	17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	
120	XX	17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
120	XX	17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	
120	XX	17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	
120	XX	17.12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	
120	XX	17.13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	
120	XX	17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
120	XX	17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
120	XX	17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	
120	XX	17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah	
120	XX	17.18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	
120	XX	17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
120	XX	17.20	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan	
120	XX	17.21	Pengembangan aplikasi keuangan berbasis simda , asistensi anggaran SKPD, dan kompilasi APBD (SKPKD) berbasis SIMDA_Keu	
120	XX	17.22	Penyusunan revisi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Siak	
120	XX	17.23	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan pajak dan retribusi daerah)	
120	XX	17.24	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan pajak dan retribusi daerah)	
120	XX	17.25	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan OP/SP PBB Baru)	
120	XX	17.26	Sistem informasi pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	
120	XX	17.27	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pekan panutan penarikan undian PBB)	
120	XX	17.28	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (verifikasi data OP/SP PBB P2 Kab. Siak)	
120	XX	17.29	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pengelolaan data OP/SP PBB P2 Kab. Siak)	
120	XX	17.30	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penagihan PBB P2 dan BPHTB Kab. Siak)	
120	XX	17.31	Yustisi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah	
120	XX	17.32	Penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah	
120	XX	17.33	Penyusunan laporan barang milik daerah	
120	XX	17.34	Pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang daerah dan hasil pengadaan	
120	XX	17.35	Pengamanan aset pemerintah kabupaten siak	
120	XX	17.36	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah(perencanaan kebutuhan)	
120	XX	17.37	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
120	XX	17.38	Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah	
120	XX	17.39	Asistensi implementasi sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah	
120	XX	17.40	Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah	
120	XX	17.41	Bimbingan teknis pengelolaan gaji PNSD	
120	XX	17.42	Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah	
120	XX	17.43	Bimbingan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten siak	
120	XX	17.44	Bimbingan teknis penyusunan anggaran bagi kasubbag program SKPD	
120	XX	17.45	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
120	XX	17.46	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	
120	XX	17.47	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	
120	XX	17.48	Sosialisasi Standarisasi Satuan Bahan dan Upah	
120	XX	17.49	Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan APBD Kabupaten Siak	
120	XX	17.50	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPA	
120	XX	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kecamatan	
120	XX	18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	
120	XX	18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	
120	XX	18.03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota	
120	XX	18.04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	
120	XX	18.05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	
120	XX	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
120	XX	19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	
120	XX	19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	
120	XX	19.03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	
120	XX	19.04	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	
120	XX	19.05	Kajian Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD)	
120	XX	19.06	Monitoring Pelaksanaan APBDesa dan Pengelolaan Aset Desa	
120	XX	19.07	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Desa	
120	XX	19.08	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa	
120	XX	19.09	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	
120	XX	19.10	Penilaian Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)	
120	XX	19.11	Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)	
120	XX	19.12	Pemantauan Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)	
120	XX	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
120	XX	20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	
120	XX	20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	

1			2	3
120	XX	20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	
120	XX	20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	
120	XX	20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	
120	XX	20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	
120	XX	20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	
120	XX	20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	
120	XX	20.09	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Pemilihan kepala desa)	
120	XX	20.10	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Pemilihan perangkat desa lainnya)	
120	XX	20.11	Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	
120	XX	20.12	Monitoring BPD Se-Kabupaten Siak	
120	XX	20.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan	
120	XX	20.14	Workshop dalam Rangka Peningkatan Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah Kabupaten Siak	
120	XX	20.15	Penyelesaian Masalah Proses Pengadaan Barang dan Jasa	
120	XX	20.16	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah	
120	XX	20.17	Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	
120	XX	20.18	Pelaksanaan Pengawasan Alokasi Dana Desa dan Kelompok Masyarakat	
120	XX	20.19	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	
120	XX	20.20	Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P)	
120	XX	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
120	XX	21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
120	XX	21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	
120	XX	22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
120	XX	22.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
120	XX	22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
120	XX	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
120	XX	23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	
120	XX	23.02	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web (Software)	
120	XX	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	
120	XX	24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	
120	XX	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
120	XX	25.01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	
120	XX	25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	
120	XX	25.03	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum	
120	XX	25.04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	
120	XX	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
120	XX	26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	
120	XX	26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	
120	XX	26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	
120	XX	26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	
120	XX	26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	
120	XX	26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru; lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	
120	XX	26.07	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	
120	XX	26.08	Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi	
120	XX	26.09	Fasilitasi kerjasama pembinaan hukum bagi aparatur pemerintah kabupaten siak	
120	XX	26.10	Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD	
120	XX	26.11	Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD	
120	XX	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
120	XX	27.01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	
120	XX	27.02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran	
120	XX	27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	
120	XX	27.04	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	
120	XX	27.05	Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa	
120	XX	27.06	Review Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa	
120	XX	28	Program Pendidikan Kedinasan	
120	XX	28.01	Pendidikan dan pelatihan teknis	
120	XX	28.02	pendidikan penjenjangan struktural	
120	XX	28.03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	
120	XX	28.04	Pembuatan buku juknis/juklak	
120	XX	28.05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	
120	XX	28.06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	
120	XX	28.07	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	
120	XX	28.08	Workshop dan Pembimbingan Administrasi Kepegawaian	
120	XX	28.09	Bimtek Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepagawaian	
120	XX	29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
120	XX	29.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	
120	XX	29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	
120	XX	29.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	
120	XX	29.04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	
120	XX	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
120	XX	30.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
120	XX	30.02	Seleksi penerimaan calon PNS	

1			2	3
120	XX	30.03	Penempatan PNS	
120	XX	30.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
120	XX	30.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	
120	XX	30.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	
120	XX	30.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	
120	XX	30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	
120	XX	30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	
120	XX	30.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	
120	XX	30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
120	XX	30.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	
120	XX	30.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	
120	XX	30.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	
120	XX	30.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
120	XX	30.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	
120	XX	30.17	Penyelenggaraan HUT KORPRI	
120	XX	30.18	Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Propinsi/Nasional	
120	XX	30.19	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	
120	XX	30.20	Pelaksanaan Sumpah/janji PNS	
120	XX	30.21	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	
120	XX	30.22	Analisis Formasi Kebutuhan Pegawai	
120	XX	30.23	Pengelolaan Penilaian Kompetensi dan Potensi Pejabat Struktural	
120	XX	30.24	Analisis Kepangkatan dan Promosi Jabatan PNS (Pengelolaan Jabatan dan Kepangkatan PNS)	
120	XX	30.25	Penataan Sistem Administrasi dan Pelayanan Kepagawaian Kabupaten Siak	
120	XX	30.26	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Masa Purna Bhakti	
120	XX	30.27	Pembekalan Pengantar Tugas	
120	XX	30.28	Pengelolaan Data Database Kepegawaian	
120	XX	30.29	Penerapan Kartu PNS Elektronik di Lingkungan Pemkab Siak	
120	XX	30.30	Pengadaan Buku Saku Pegawai	
120	XX	30.31	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja dan Praja IPDN	
120	XX	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan	
120	XX	31.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
120	XX	31.02	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan (MTQ kecamatan)	
120	XX	31.03	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)	
120	XX	31.04	Penyelenggaraan Siak Bermadah	
120	XX	31.05	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak (MTQ Kabupaten Siak)	
120	XX	31.06	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)	
120	XX	31.07	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	
120	XX	31.08	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	
120	XX	31.09	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)	
120	XX	31.10	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	
120	XX	31.11	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan (MTQ Kelurahan)	
120	XX	31.12	Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan	
120	XX	31.13	Penyelenggaraan Penanaman Perdana Benih Padi (Turun Bumi)	
120	XX	31.14	Penyelenggaraan Petang Megang (Ramadhan)	
120	XX	32	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	
120	XX	32.01	Monitoring Perizinan	
120	XX	32.02	Sosialisasi Perizinan	
120	XX	32.03	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Kantor Camat Siak	
120	XX	32.04	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kelurahan Perawang	
120	XX	32.05	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
120	XX	32.06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	
120	XX	32.07	Survey Kepuasan Masyarakat	
120	XX	33	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	
120	XX	33.01	Pembangunan Asrama Siswa Islamic Centre	
120	XX	33.02	Pembangunan Asrama Haji Kab. Siak	
120	XX	33.03	Pembangunan SMA Islamic Centre Kab. Siak	
120	XX	33.04	Pembangunan sarana penunjang MAN Insan Cendekia Tualang	
120	XX	33.05	Pembangunan Perumahan Guru Kawasan Islamic Centre	
120	XX	33.06	Pelatihan Guru Mata Pelajaran PDTA	
120	XX	33.07	Pelaksanaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)	
120	XX	33.08	Pelaksanaan Pekan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)	
120	XX	33.09	Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA/TPA dan Pondok Pesantren	
120	XX	33.10	Pembangunan PDTA, MTS, MA dan Ponpes	
120	XX	33.11	Rehab PDTA, MTS, MA dan Ponpes	
120	XX	33.12	Pendidikan Gratis MI	
120	XX	33.13	Penyediaan Sarana Prasarana MTQ	PENAMBAHAN
120	XX	33.14	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Agung Sultan Syarif Hasyim	PENAMBAHAN
120	XX	34	program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	
120	XX	34.01	Penyusunan Pedoman Evaluasi Perangkat Daerah	
120	XX	35	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	
120	XX	35.01	Identifikasi dan penyusunan profil BUMD/Perusahaan Daerah	
120	XX	35.02	Workshop penyusunan SOP BUMD	
120	XX	35.03	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	
120	XX	35.04	Diagnostik assesment penerapan GCG	
120	XX	35.05	Penyusunan Code of CG dan Code of Conduct (Pedoman Kode Etik dan Perilaku Perusahaan)	

1			2	3
120	XX	36	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	
120	XX	36.01	Bantuan insentif bagi Da' I dan Khatib se - Kabupaten Siak	
120	XX	36.02	Pelatihan penyelenggaraan Jenazah	
120	XX	36.03	Pelatihan Peningkatan Mutu Imam, Khatib, dan Bilal	
120	XX	36.04	Pengiriman Jemaah Calon Haji dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Siak di Embarkasi	
120	XX	36.05	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	
120	XX	36.06	Pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh oleh Pemerintah Kabupaten Siak	
120	XX	36.07	Peningkatan Mutu Dai/Daiah se-Kabupaten Siak	
120	XX	36.08	Pelatihan Pengelolaan Tanah Wakaf	
120	XX	36.09	Safari Jum'at Pemerintah Kabupaten Siak	
120	XX	36.10	Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	
120	XX	37	Program Jaminan Sosial	
120	XX	37.01	Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)	
120	XX	37.02	Koordinasi dan Evaluasi Raskin	
120	XX	38	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	
120	XX	38.01	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	
120	XX	38.02	Evaluasi Penataan OPD dan UPTD, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas SKPD dan UPTD	
120	XX	39	Program Sosialisasi Hukum Daerah	
120	XX	39.01	Sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Siak	
120	XX	39.02	Penyuluhan hukum terpadu tentang implementasi peraturan perundang-undangan	
120	XX	39.03	Diseminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Siak	
120	XX	39.04	Lomba Kadarkum	
120	XX	39.05	Sosialisasi Juknis Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat	
120	XX	40	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	
120	XX	40.01	Evaluasi dan Pelaporan tentang Implementasi Produk Hukum Daerah	
120	XX	40.02	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	
120	XX	41	Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
120	XX	41.01	Facilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada	
120	XX	42	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	
120	XX	42.01	Manasik Haji Kabupaten Siak	
120	XX	42.02	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	
120	XX	42.03	Pegiriman Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Siak pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	
120	XX	42.04	Pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK)	
120	XX	42.05	Pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Tingkat Propinsi Riau	
120	XX	42.06	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten Siak	
120	XX	42.07	Pelatihan Pengurus Remaja Masjid Se Kabupaten Siak	
120	XX	42.08	Pelatihan Manajemen Pengurus Masjid Se Kabupaten Siak	
120	XX	42.09	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	
120	XX	42.10	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	PENAMBAHAN
120	XX	43	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan	
120	XX	43.01	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Produksi di Daerah	
120	XX	43.02	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal	
120	XX	43.03	Koordinasi dan Pemantauan Pemanfaatan bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	
120	XX	44	Program Pembinaan Perekonomian Rakyat	
120	XX	44.01	Workshop sumber daya pengelolaan koperasi / UMKM	
120	XX	44.02	Pelatihan pengembangan usaha kerakyatan dan lain-lain	
120	XX	45	Program Batas Wilayah Pemerintahan	
120	XX	45.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
120	XX	46	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	
120	XX	46.01	Facilitas penyelenggaraan pembinaan pemerintah (Bed Nama)	
121			Ketahanan Pangan	
121	XX	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
121	XX	15.01	Penanganan daerah rawan pangan	
121	XX	15.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	
121	XX	15.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	
121	XX	15.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	
121	XX	15.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	
121	XX	15.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	
121	XX	15.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	
121	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	
121	XX	15.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	
121	XX	15.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	
121	XX	15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	
121	XX	15.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	
121	XX	15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	
121	XX	15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	
121	XX	15.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija	
121	XX	15.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	
121	XX	15.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	

1			2	3
121	XX	15.18	Pengembangan lumbung pangan desa	
121	XX	15.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	
121	XX	15.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	
121	XX	15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	
121	XX	15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	
121	XX	15.23	Koordinasi kebijakan perberasan	
121	XX	15.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	
121	XX	15.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	
121	XX	15.26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	
121	XX	15.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	
121	XX	15.28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen	
121	XX	15.29	Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian	
121	XX	15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	
121	XX	15.31	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
121	XX	15.32	Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang	
121	XX	15.33	Penyuluhan Ketahanan Pangan Melalui Radio, TV dan Surat Kabar	
121	XX	15.34	Pameran Ketahanan Pangan Dan Lomba Cipta Menu	
121	XX	15.35	HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	
121	XX	15.36	Penerapan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian	
121	XX	15.37	Pendataan dan Pemetaan Produksi dan Kebutuhan Pangan	
121	XX	15.38	Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan Daerah	
121	XX	15.39	Rapat Teknis dan sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan	
121	XX	15.40	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	
121	XX	15.41	Penyusunan Rancangan Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan DKP	
121	XX	15.42	Penyusunan Rancangan Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan UPTB/BPK	
121	XX	15.43	Penanggulangan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	
121	XX	15.44	Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	
121	XX	15.45	Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Program Penyuluhan	
121	XX	15.46	Penyusunan Program Penyuluhan	
121	XX	15.47	Pendampingan KRPL	
121	XX	16	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
121	XX	16.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
121	XX	16.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
121	XX	16.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	
121	XX	16.04	Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	
121	XX	16.05	Studi Banding/Magang Petani dan Penyuluh	
121	XX	16.06	Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Penyuluh	
121	XX	17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	
121	XX	17.01	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat; Penyusunan Silabi; Penyusunan Modul; Penyusunan Pedoman Diklat)	
121	XX	18	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	
121	XX	18.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	
121	XX	18.02	Inventarisasi dan klarifikasi serta pengembangan kelembagaan perkebunan rakyat	
121	XX	18.03	Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan besar swasta	
121	XX	18.04	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat	
121	XX	19	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	
121	XX	19.01	Pengembangan perbenihan/perbibitan	
121	XX	19.02	Revitalisasi lahan perkebunan	
121	XX	19.03	Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan	
121	XX	19.04	Pembinaan dan peningkatan mutu hasil perkebunan	
121	XX	19.05	Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil kehutanan dan perkebunan	
121	XX	19.06	Pembangunan kebun induk tanaman perkebunan	
122			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
122	XX	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	
122	XX	15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	
122	XX	15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	
122	XX	15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	
122	XX	15.04	Lomba Pos Pelayanan Teknologi	
122	XX	15.05	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
122	XX	15.06	Pembinaan Program Pemberdayaan Desa (PPD)	
122	XX	15.07	Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)	
122	XX	15.08	Gelar Teknologi Tepat Guna	
122	XX	15.09	Desa Binaan Keluarga Sakinah	
122	XX	15.10	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	
122	XX	15.11	Monitoring Rumah Layak Huni dan Infrastruktur Pendukung	
122	XX	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
122	XX	16.01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman	
122	XX	16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	
122	XX	16.03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	
122	XX	16.04	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan	
122	XX	16.05	Fasilitasi modalitas bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	
122	XX	16.06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	
122	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
122	XX	16.08	Perlombaan desa dan kelurahan	
122	XX	16.09	Perlombaan Desa Binaan Program P2WKSS	
122	XX	16.10	Monitoring Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan	

1			2	3
122	XX	16.11	Pembinaan Pasar Desa	
122	XX	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
122	XX	17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	
122	XX	17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	
122	XX	17.03	Pemberian stimulan pembangunan desa	
122	XX	17.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
122	XX	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	
122	XX	18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	
122	XX	18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	
122	XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
122	XX	18.05	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintahan desa tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	
122	XX	18.06	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes	
122	XX	18.07	Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa	
122	XX	18.08	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ	
122	XX	18.09	Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang BPD	
122	XX	18.10	Pelatihan Pengelolaan Potensi Desa	
122	XX	18.11	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Desa	
122	XX	18.12	Bimtek Sarjana Pendamping Keuangan Desa	
122	XX	18.13	Pelatihan Manajemen Posyantek	
122	XX	18.14	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat P3MD Se-Kabupaten Siak	
122	XX	18.15	Temu Karya LPM Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Siak	
122	XX	18.16	Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perdesaan	
122	XX	18.17	Pelatihan Pengelola UED-SP	
122	XX	18.18	Pelatihan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Terpadu (P3MD)	
122	XX	18.19	Temu Wicara	
122	XX	18.20	Sosialisasi Undang-Undang Desa	
122	XX	18.21	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	
122	XX	18.22	Peningkatan Peran Posyandu Dalam Pelayanan Sosial Masyarakat	
122	XX	18.23	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	
122	XX	18.24	Pelatihan Karang Taruna	
122	XX	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	
122	XX	19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	
123			Statistik	
123	XX	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	
123	XX	15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	
123	XX	15.02	Pengolahan; updating dan analisis data dan statistik daerah	
123	XX	15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	
123	XX	15.04	Pengolahan; updating dan analisis data PDRB	
124			Kearsipan	
124	XX	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	
124	XX	15.01	Pembangunan data base informasi kearsipan	
124	XX	15.02	Pengumpulan data	
124	XX	15.03	Pengklasifikasian data	
124	XX	15.04	Penyusunan sistem katalog data	
124	XX	15.05	Pengadaan sarana penyimpanan	
124	XX	15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	
124	XX	15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	
124	XX	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
124	XX	16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	
124	XX	16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	
124	XX	16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	
124	XX	16.04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	
124	XX	16.05	Bimbingan Teknis dan Diklat Kearsipan	
124	XX	16.06	Akuisisi Arsip	
124	XX	16.07	Pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	
124	XX	16.08	Restorasi Arsip/Dokumen Daerah	
124	XX	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	
124	XX	17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	
124	XX	17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	
124	XX	17.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	
124	XX	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	
124	XX	18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	
124	XX	18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	
124	XX	18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	
125			Komunikasi dan Informatika	
125	XX	15	Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa	
125	XX	15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	
125	XX	15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	
125	XX	15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	
125	XX	15.04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
125	XX	15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	
125	XX	15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	

1			2	3
125	XX	15.07	Pengembangan Jaringan Internet di Kecamatan	
125	XX	15.08	Pengembangan Area Hotspot dan Jaringan Internet Sekolah Kecamatan	
125	XX	16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	
125	XX	16.01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	
125	XX	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
125	XX	17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	
125	XX	17.02	Pelatihan komunikasi efektif	
125	XX	18	Program kerjasama informasi dengan mas media	
125	XX	18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	
125	XX	18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	
125	XX	18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	
125	XX	18.04	Peliputan Kegiatan DPRD Kabupaten Siak	
125	XX	18.05	Kerjasama dan Sewa Halaman Melalui Media dengan Pemerintah Daerah Kabuapten Siak	
125	XX	18.06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak	
125	XX	18.07	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Eletronik	
125	XX	18.08	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	
125	XX	18.09	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	
125	XX	18.10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Internet/Media Online	
125	XX	19	Program pengembangan data dan statistik.	
125	XX	19.01	Updating Data Sumber Daya Alam; Ekonomi; Keuangan dan Investasi	
126			Perpustakaan	
126	XX	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
126	XX	15.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	
126	XX	15.02	Implementasi strategi peningkatan dan pengembangan minat dan budaya baca	
126	XX	15.03	Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
126	XX	15.04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	
126	XX	15.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	
126	XX	15.06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	
126	XX	15.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	
126	XX	15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	
126	XX	15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	
126	XX	15.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
126	XX	15.11	Penerapan dan Pendampingan Rekomendasi Kebijakan Lokal	
126	XX	15.12	Perencanaan Cetak SOP Layanan dan Penyusunan Program budaya Baca	
126	XX	15.13	Penyediaan Bahan Pustaka, Perpustakaan Keliling	
126	XX	15.14	Penyelenggaraan Perlombaan/Perayaan dan Festival	
126	XX	15.15	Identifikasi Pemetaan Minat Budaya Baca	
126	XX	15.16	Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Perpustakaan	
126	XX	15.17	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perpustakaan	
126	XX	15.18	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan	
126	XX	15.19	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Sekolah	
126	XX	15.20	Penyelenggaraan Koleksi Perpustakaan/Dokumen Arsip	
126	XX	15.21	Penerapan dan Pendampingan Rekomendasi Kebijakan Lokal	
126	XX	15.22	Pembuatan Profil Perpustakaan di Kabupaten	
126	XX	16	Program evaluasi , pelatihan dan penyelenggaraan bimbingan teknis	
126	XX	16.01	Pengembangan pustakawan, koleksi perpustakaan pengolahan, preservasi dan konservasi bahan pustaka	
126	XX	17	Program pengembangan manajemen pelayanan perpustakaan	
126	XX	17.01	Pembinaan dan stimulasi bagi pengunjung perpustakaan	
126	XX	17.02	Pembinaan dan kerjasama mitra perpustakaan	
126	XX	17.03	Pembuatan standar pelayanan minimum bagi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa	
126	XX	17.04	Manajemen Layanan Digitalisasi	
126	XX	18	Program pengembangan kapasitas tenaga pustakawan dan arsiparis	
126	XX	18.01	Pengiriman pustakawan dan arsiparis mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan lain sebagainya	
126	XX	18.02	Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepastakaan	
126	XX	18.03	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	
126	XX	19	Program pembangunan dan pengembangan pustaka kecamatan dan desa	
126	XX	19.01	Pembuatan design engineering detail (DED) perpustakaan desa	
126	XX	20	Program pengadaan bahan bacaan dan sarana pendukung perpustakaan	
126	XX	20.01	Penyediaan bahan pustaka, perpustakaan desa/masyarakat/tempat ibadah	
126	XX	20.02	Penyediaan Bahan Pustaka dan Sarana Pendukung Perpustakaan Desa/Masyarakat/Tempat Ibadah	
126	XX	21	Program pengembangan pustaka elektronik	
126	XX	21.01	Pembuatan e-library	
126	XX	22	Program pengembangan kemitraan pustaka sekolah	
126	XX	22.01	Pembinaan dan kerjasama mitra perpustakaan sekolah	
2			Urusan Pilihan	
201			Pertanian	
201	XX	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	

1			2	3
201	XX	15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	
201	XX	15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	
201	XX	15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	
201	XX	15.04	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani	
201	XX	15.05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	
201	XX	15.06	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	
201	XX	15.07	Pekan Nasional (PENAS) KTNA	
201	XX	15.08	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pelaku Agribisnis Tanaman Holtikultura	
201	XX	15.09	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani	
201	XX	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	
201	XX	16.01	Penanganan daerah rawan pangan	
201	XX	16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	
201	XX	16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	
201	XX	16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	
201	XX	16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	
201	XX	16.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	
201	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	
201	XX	16.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	
201	XX	16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	
201	XX	16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	
201	XX	16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	
201	XX	16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	
201	XX	16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	
201	XX	16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	
201	XX	16.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija	
201	XX	16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	
201	XX	16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	
201	XX	16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	
201	XX	16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	
201	XX	16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	
201	XX	16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	
201	XX	16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	
201	XX	16.23	Koordinasi kebijakan perberasan	
201	XX	16.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	
201	XX	16.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	
201	XX	16.26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	
201	XX	16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	
201	XX	16.28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen	
201	XX	16.29	Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian	
201	XX	16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	
201	XX	16.31	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	17.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	17.02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer.	
201	XX	17.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan	
201	XX	17.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	17.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan	
201	XX	17.06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	
201	XX	17.08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	
201	XX	17.09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	
201	XX	17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	
201	XX	17.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	
201	XX	17.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	
201	XX	17.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
201	XX	18.01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
201	XX	18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
201	XX	18.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
201	XX	18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
201	XX	18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
201	XX	18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	
201	XX	18.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	19.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	
201	XX	19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	
201	XX	19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	
201	XX	19.05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	
201	XX	19.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
201	XX	20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
201	XX	20.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
201	XX	20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	
201	XX	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
201	XX	21.01	Pendataan masalah peternakan	

1			2	3
201	XX	21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	
201	XX	21.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	
201	XX	21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	
201	XX	21.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	21.06	Sosialisasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	
201	XX	21.07	Surveillance penyakit hewan menular strategis (PHMS)	
201	XX	21.08	Pengendalian populasi ternak terjangkit zoonosis	
201	XX	21.09	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit flu burung	
201	XX	21.10	Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	
201	XX	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
201	XX	22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	
201	XX	22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	
201	XX	22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	
201	XX	22.04	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	
201	XX	22.05	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	
201	XX	22.06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	
201	XX	22.07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	
201	XX	22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	
201	XX	22.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	22.10	Facilitasi pengembangan kawasan agropolitan	
201	XX	22.11	Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman	
201	XX	22.12	Pengembangan Indukan Ternak	
201	XX	22.13	Peningkatan sarana dan prasarana di Demplot Jatibaru	
201	XX	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
201	XX	23.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	
201	XX	23.02	Facilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.	
201	XX	23.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	
201	XX	23.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan	
201	XX	23.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	
201	XX	23.06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan	
201	XX	23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	
201	XX	23.08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	
201	XX	23.09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	
201	XX	23.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	
201	XX	23.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	
201	XX	23.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	
201	XX	23.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
201	XX	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	
201	XX	24.01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	
201	XX	24.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	
201	XX	24.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	
201	XX	24.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	
201	XX	24.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	
201	XX	24.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
201	XX	24.07	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Hewan	
201	XX	25	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
201	XX	25.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	
201	XX	25.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	
201	XX	25.03	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung	
201	XX	25.04	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai	
201	XX	25.05	Perluasan Areal Sawah	
201	XX	25.06	Pengembangan Bibit/benih Tanaman Pangan	
201	XX	25.07	Peningkatan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan	
201	XX	25.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian	
201	XX	25.09	Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi	
201	XX	25.10	Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	
201	XX	25.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
201	XX	25.12	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	
201	XX	26	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	
201	XX	26.01	Perluasaan Areal Hortikultura	
201	XX	26.02	Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran	
201	XX	26.03	Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan	
201	XX	26.04	Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias	
201	XX	26.05	Pengembangan Benih/Bibit Hortikultura	
201	XX	27	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian	
201	XX	27.01	Promosi Hasil Produksi Pertanian	
201	XX	27.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil produk Pertanian	
201	XX	27.03	Workshop Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi	
201	XX	27.04	Pembinaan Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi	
201	XX	27.05	Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian	
201	XX	28	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
201	XX	28.01	Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	
201	XX	28.02	Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian	
201	XX	28.03	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	
201	XX	28.04	Pengadaan alat dan mesin pasca panen pertanian	

1			2	3
201	XX	28.05	Penyediaan sarana produksi pertanian	
202			Kehutanan	
202	XX	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
202	XX	15.01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	
202	XX	15.02	Pengembangan hutan tanaman	
202	XX	15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu	
202	XX	15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	
202	XX	15.05	Optimalisasi PNPB	
202	XX	15.06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	
202	XX	15.07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	
202	XX	15.08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	
202	XX	15.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
202	XX	15.10	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan	
202	XX	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	
202	XX	16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	
202	XX	16.02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	
202	XX	16.03	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	
202	XX	16.04	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota, Hutan Wisata dan Taman Kota	
202	XX	16.05	Pembinaan; pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	
202	XX	16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	
202	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
202	XX	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	
202	XX	17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
202	XX	17.02	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	
202	XX	17.03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
202	XX	17.04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	
202	XX	17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	
202	XX	17.06	Operasi pengamanan hutan lintas daerah	
202	XX	17.07	Penanggulangan gangguan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang	
202	XX	17.08	Penyelamatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai	
202	XX	17.09	Pemeliharaan Tanaman RHL	
202	XX	17.10	Penghijauan dan Pembuatan Jalur Hijau	
202	XX	17.11	Penanaman serentak gerakan menanam pohon nasional	
202	XX	17.12	Rehabilitasi Kawasan dan Hutan Mangrove	
202	XX	18	Program pemanfaatan kawasan hutan industri	
202	XX	18.01	Pertanian tanaman palawija; padi gogorancah	
202	XX	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	
202	XX	19.01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	
202	XX	19.02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	
202	XX	19.03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	
202	XX	19.04	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	
202	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
202	XX	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	
202	XX	20.01	Pengembangan hutan masyarakat adat	
202	XX	20.02	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat	
202	XX	20.03	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan survey lapangan	
202	XX	20.04	Inventarisasi dan Klarifikasi Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Pemetaan Kawasan Hutan dan Lahan)	
202	XX	20.05	Inventarisasi dan Klarifikasi Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)	
202	XX	20.06	Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum	
202	XX	20.07	Pemantapan status kawasan hutan	
202	XX	20.08	Pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum	
202	XX	20.09	Fasilitasi kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	
202	XX	20.10	Penetapan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	
202	XX	20.11	Monitoring, Pendataan, dan Evaluasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan	
202	XX	20.12	Penyusunan Rancangan Teknik Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
203			Energi dan Sumberdaya Mineral	
203	XX	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	
203	XX	15.01	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	
203	XX	15.02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	
203	XX	15.03	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	
203	XX	15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	
203	XX	15.05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C	
203	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
203	XX	15.07	Penetapan lokasi tambang rakyat	
203	XX	15.08	Inventarisasi dan Penyusunan Data Potensi Pertambangan	
203	XX	15.09	Monitoring dan pengendalian penambangan	
203	XX	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	
203	XX	16.01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	
203	XX	16.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	
203	XX	16.03	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	
203	XX	16.04	Pembuatan Sumur Pantau Air Tanah	
203	XX	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
203	XX	17.01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrik	

1			2	3
203	XX	17.02	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Mempura	
203	XX	17.03	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Koto Gasib	
203	XX	17.04	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Kandis	
203	XX	17.05	Pembangunan PLTS Bagi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Kandis	
203	XX	17.06	Perencanaan Listrik Pedesaan di Pemukiman Balai Kayang dan Mesjid Komplek Kediaman Kepala Daerah di Kecamatan Siak	
203	XX	17.07	Perencanaan Listrik Pedesaan di Kabupaten Siak	
203	XX	17.08	Pembangunan Listrik Pedesaan di Desa Berbari	
203	XX	17.09	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Bagi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Sungai Mandau	
203	XX	17.10	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Siak	
203	XX	17.11	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Bungaraya	
203	XX	17.12	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Dayun	
203	XX	17.13	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Pusako	
203	XX	17.14	Pembangunan Tower Tegangan Menengah dan Kelengkapannya di Kabupaten Siak	
203	XX	17.15	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah	
203	XX	17.16	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Minas	
203	XX	17.17	Pembangunan Listrik Pedesaan di Desa Merempan Hulu RT.01 sampai RT.02 Menuju Desa Tumang Kecamatan Siak	
203	XX	17.18	Pembangunan PLTS Terpusat dan Kelengkapannya di Kecamatan Sungai Mandau	
203	XX	17.19	Pembangunan Listrik Pedesaan dan Jaringan PLN Menuju Kec. Minas	
203	XX	17.20	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Sungai Mandau	
203	XX	17.21	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Sabak Auh	
203	XX	17.22	Updating Database dan Sistem Informasi Geografis Sistem Kelistrikan	
203	XX	17.23	Penyusunan Kajian Potensi Sumber Energi Alternatif	
203	XX	17.24	Pembangunan Pembangkit Biogas di Kabupaten Siak	
203	XX	18	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas	
203	XX	18.01	Validasi Data Pendukung Lifting DBH SDA Migas	
203	XX	18.02	Inventarisasi badan usaha jasa penunjang migas hulu dan hilir kegiatan minyak dan gas di Kabupaten Siak	
203	XX	19	Program Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	
203	XX	19.01	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Air Tanah	
203	XX	19.02	Pengadaan kelengkapan sistem informasi geografis	
203	XX	19.03	Eksplorasi dan Pemetaan Potensi Air Tanah di Kabupaten Siak	
203	XX	19.04	Penyusunan database pertambangan dan energi Kabupaten Siak	
203	XX	19.05	Pembuatan sumur bor air tanah	
203	XX	19.06	Survey investigasi detail dan perencanaan pembuatan sumur bor dan kelengkapannya	
203	XX	20	Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
203	XX	20.01	Monitoring dan Evaluasi PJU Kabupaten Siak	
203	XX	20.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan PJU Kabupaten Siak	
203	XX	20.03	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kecamatan Siak	
203	XX	20.04	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi PJU Kabupaten Siak	
203	XX	20.05	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kabupaten Siak	
204			Pariwisata	
204	XX	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
204	XX	15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	
204	XX	15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	
204	XX	15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	
204	XX	15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	
204	XX	15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	
204	XX	15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	
204	XX	15.07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	
204	XX	15.08	Pelatihan pemandu wisata terpadu	
204	XX	15.09	Pekan Safar ``Tradisi Ghatib Beghanyut`` Ritual Tolak Bala	
204	XX	15.10	Perayaan menyambut Hari besar keagamaan	
204	XX	15.11	Malay Art Festival	
204	XX	15.12	Mengikuti festival dan parade	
204	XX	15.13	Penampilan dan festival seni kabupaten siak	
204	XX	15.14	Pembuatan/sewa media/space iklan promosi pariwisata	
204	XX	15.15	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah	
204	XX	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
204	XX	16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	
204	XX	16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
204	XX	16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	
204	XX	16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	
204	XX	16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	
204	XX	16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	
204	XX	16.07	Pengembangan; sosialisasi; dan penerapan serta pengawasan standardisasi	
204	XX	16.08	Rehab Sedang/berat peninggalan bersejarah	
204	XX	16.09	Festival Siak Bermadah	
204	XX	16.10	Pembangunan Landscape Taman Burung	
204	XX	17	Program Pengembangan Kemitraan	
204	XX	17.01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	
204	XX	17.02	Pengembangan dan penguatan litbang; kebudayaan dan pariwisata	
204	XX	17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	
204	XX	17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	
204	XX	17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	
204	XX	17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	
204	XX	17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	

1			2	3
204	XX	17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	
204	XX	17.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
205			Kelautan dan Perikanan	
205	XX	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	
205	XX	15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	
205	XX	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	
205	XX	16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	
205	XX	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	
205	XX	17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	
205	XX	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	
205	XX	18.01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	
205	XX	19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	
205	XX	19.01	Penyuluhan budaya kelautan	
205	XX	20	Program pengembangan budidaya perikanan	
205	XX	20.01	Pengembangan bibit ikan unggul	
205	XX	20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	
205	XX	20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	
205	XX	20.04	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan	
205	XX	20.05	Pelatihan CPIB, CBIB dan Pelatihan Pembuatan Pelet Ikan	
205	XX	20.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	
205	XX	20.07	Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB)	
205	XX	20.08	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas perikanan budidaya	
205	XX	20.09	Pelatihan pengembangan sistem kesehatan dan lingkungan budidaya ikan	
205	XX	20.10	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan	
205	XX	21	Program pengembangan perikanan tangkap	
205	XX	21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	
205	XX	21.02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	
205	XX	21.03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	
205	XX	21.04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	
205	XX	21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	
205	XX	21.06	Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	
205	XX	21.07	Motorisasi Armada Perikanan dalam Upaya Peningkatan Daya Jelajah dan Produksi	
205	XX	21.08	Gelar operasional pengawasan terpadu pengairan	
205	XX	21.09	Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan tangkap (PUMP-PT)	
205	XX	21.10	Pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap	
205	XX	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	
205	XX	22.01	Kajian sistem penyuluhan perikanan	
205	XX	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
205	XX	23.01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
205	XX	23.02	Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP - P2HP)	
205	XX	23.03	Lomba Masak Berbahan Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Makan Ikan	
205	XX	23.04	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	
205	XX	23.05	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	
205	XX	23.06	Pelatihan pengolahan produk hasil perikanan	
205	XX	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar	
205	XX	24.01	Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar	
205	XX	25	Penyebarnya Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
205	XX	25.01	Penyusunan Data dan Informasi Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan	
205	XX	25.02	Pengelolaan dan Pemutakhiran data perikanan dan kelautan	
206			Perdagangan	
206	XX	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
206	XX	15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	
206	XX	15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	
206	XX	15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	
206	XX	15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah (Pendataan potensi dan pengguna UTTP di pasar dan Masyarakat)	
206	XX	15.05	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kemeterologian Daerah	
206	XX	15.06	Pengawasan UTTP (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit dan Masyarakat)	
206	XX	15.07	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	
206	XX	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	
206	XX	16.01	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	
206	XX	16.02	Penyebarnya informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa	
206	XX	16.03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional	
206	XX	16.04	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang	
206	XX	16.05	koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	
206	XX	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
206	XX	17.01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	
206	XX	17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	

1			2	3
206	XX	17.03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	
206	XX	17.04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	
206	XX	17.05	Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional; bilateral; regional dan internasional	
206	XX	17.06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	
206	XX	17.07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri	
206	XX	17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	
206	XX	17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha	
206	XX	17.10	Pengembangan kluster produk ekspor	
206	XX	17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	
206	XX	17.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	
206	XX	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
206	XX	18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan; kebijakan dan pelaksanaan operasional	
206	XX	18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	
206	XX	18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	
206	XX	18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	
206	XX	18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	
206	XX	18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	
206	XX	18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	
206	XX	18.08	Monitoring Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Siak dan Operasional Pasar	
206	XX	18.09	Pengawasan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi	
206	XX	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	
206	XX	19.01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	
206	XX	19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.	
206	XX	19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	
206	XX	19.04	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	
206	XX	19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.	
206	XX	19.06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan.	
206	XX	20	Program Pengembangan Kinerja Pasar	
206	XX	20.01	Peningkatan/Pemeliharaan Pasar	
206	XX	20.02	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan sarana dan prasarana pasar Kec. Sei. Apit)	
206	XX	20.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kec. Kandis)	
206	XX	20.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pasar	
206	XX	20.05	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Mempura)	
206	XX	20.06	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Bunga Raya)	
206	XX	20.07	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Tualang)	
206	XX	20.08	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Sabak Auh)	
206	XX	20.09	Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional	
207	XX		Industri	
207	XX	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
207	XX	15.01	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	
207	XX	15.02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator	
207	XX	15.03	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi	
207	XX	15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas	
207	XX	15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	
207	XX	15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	
207	XX	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
207	XX	16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	
207	XX	16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	
207	XX	16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	
207	XX	16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	
207	XX	16.05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	
207	XX	16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta	
207	XX	16.07	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir	
207	XX	16.08	Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Industri Berprestasi	
207	XX	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
207	XX	17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	
207	XX	17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	
207	XX	17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	
207	XX	17.04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	
207	XX	17.05	Pelatihan Teknis Tenun Siak	
207	XX	17.06	Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan	
207	XX	17.07	Pelatihan Diversifikasi produk Kerajinan Batik Siak	
207	XX	17.08	Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan Keramik	
207	XX	18	Program Penataan Struktur Industri	
207	XX	18.01	Kebijakan keterkaitan industrri hulu-hilir	
207	XX	18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	
207	XX	18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	
207	XX	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	
207	XX	19.01	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	
207	XX	19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	

1			2	3
208			Ketransmigrasian	
208	XX	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
208	XX	15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	
208	XX	15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah; antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	
208	XX	15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	
208	XX	15.04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi	
208	XX	15.05	Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	
208	XX	15.06	Pembinaan dan pengembangan daerah transmigrasi	
208	XX	15.07	Pendataan Eks Transmigrasi	
208	XX	16	Program Transmigrasi lokal	
208	XX	16.01	Penyuluhan transmigrasi lokal	
208	XX	16.02	Pelatihan transmigrasi lokal	
208	XX	17	Program Transmigrasi regional	
208	XX	17.01	Penyuluhan transmigrasi regional	
208	XX	17.02	Pelatihan transmigrasi regional	

h BUPATI SIAK, P
47 SYAMSUAR 12

**DAFTAR KODE AKUN APBD
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	
4.1.1.01	Pajak Hotel	
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	
4.1.1.01.10	Motel	
4.1.1.01.11	Cottage	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata	
4.1.1.02	Pajak Restoran	
4.1.1.02.01	Restoran	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	
4.1.1.02.03	Kafetaria	
4.1.1.02.04	Kantin	
4.1.1.02.05	Katering	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.07	Bar	
4.1.1.02.08	Jasa Boga	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	
4.1.1.03.05	Pameran	
4.1.1.03.06	Diskotik	
4.1.1.03.07	Karaoke	
4.1.1.03.08	Klub Malam	
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobat/sulap	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	
4.1.1.03.11	Permainan Golf	
4.1.1.03.12	Permainan Bowling	
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	
4.1.1.04	Pajak Reklame	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	
4.1.1.04.06	Reklame Udara	
4.1.1.04.07	Reklame Apung	

1	2	3
4.1.1.04.08	Reklame Suara	
4.1.1.04.09	Reklame Film/slide	
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	
4.1.1.06	Pajak Parkir	
4.1.1.06.01	Pajak Parkir	
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	
4.1.1.08	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.09	Pajak Lingkungan	
4.1.1.09.01	Pajak Lingkungan	
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.10.01	Asbes	
4.1.1.10.02	Batu Tulis	
4.1.1.10.03	Batu Setengah Permata	
4.1.1.10.04	Batu Kapur	
4.1.1.10.05	Batu Apung	
4.1.1.10.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.1.12.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.2.01.11	Retribusi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	
4.1.2.01.12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.2.01.13	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Di hapus)	
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.10	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.02.11	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Di hapus)	
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	

1	2	3
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Peruntukan Tanah	
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Pengusahaan Penangkaran Sarung Burung Walet	
4.1.2.03.09	Retribusi di Bidang Perdagangan (SIUP/TDG/TDP)	
4.1.2.03.10	Retribusi Tenaga Kerja Asing	PENAMBAHAN
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	
4.1.3.01.02	BUMD	
4.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.02.01	BUMN	
4.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi	
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	
4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan	
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan	
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan	
4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan	
4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah	
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan	
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10	Bidang Pertanian	

1	2	3
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Di hapus)	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan (Di hapus)	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak	
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial	
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	
4.1.4.11.03	Sewa Aset Daerah	
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan	
4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas	
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	
4.1.4.13.04	Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK	
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.4.14.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
4.1.4.15	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya	
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	
4.1.4.17	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
4.1.4.17.01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4.2	Dana Perimbangan	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	

1	2	3
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di hapus)	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01	Dana alokasi khusus	
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01	Pemerintah	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral	
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral	
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya	
4.3.2	Dana Darurat	
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air (Di hapus)	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Di hapus)	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	

1	2	3
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian DAU	
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	
4.3.4.01.03	Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	
4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	
4.3.4.01.05	Dana Desa	
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota	
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	
5.1.1.01.10	Uang Paket	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19	Tunjangan Daerah Terpencil	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian	
5.1.1.01.23	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan	

1	2	3
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.03.02	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Di hapus/koding tidak dipakai lagi)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.2	Belanja Bunga	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi	
5.1.3	Belanja Subsidi	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga	
5.1.4	Belanja Hibah	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	
5.1.4.01.03	Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum	
5.1.4.01.04	Belanja Hibah Kepada Tentara Manunggal Membangun Desa	
5.1.4.01.05	Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor	PENAMBAHAN
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.4.02.01	Pemerintah Provinsi	
5.1.4.02.02	Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah	
5.1.4.03.01	Perusahaan Daerah	
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat	
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sei Apit	
5.1.4.04.03	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.04	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.05	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.06	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.07	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Bunga Raya	
5.1.4.04.08	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.09	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Lubuk Dalam	
5.1.4.04.11	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kerinci Kanan	
5.1.4.04.12	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.13	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.14	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.15	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Siak	
5.1.4.04.16	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.17	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Minas	
5.1.4.04.18	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.19	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kerinci Kanan	

1	2	3
5.1.4.04.20	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Bunga Raya	
5.1.4.04.21	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.22	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.23	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.24	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Lubuk Dalam	
5.1.4.04.25	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.26	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.27	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.28	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.29	Penghargaan kepada Pokmas - Pokmas yang Berprestasi dalam pelaksanaan Spesific Grant	
5.1.4.04.30	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.31	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.32	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.33	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.34	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.35	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Madrasah Negeri	
5.1.4.04.36	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Mempura	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.4.05.01	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	
5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	
5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian dan Olahraga	
5.1.4.05.04	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	
5.1.4.05.05	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi dan Sosial	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Terencana	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tidak Terencana	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	

1	2	3
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDI-P	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPP	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKB	
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDS	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PBB	
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPRN	
5.1.7.05.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	
5.1.7.05.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh	
5.1.7.05.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
5.1.7.05.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.2	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1	Belanja Pegawai	
5.2.1.01	Honorarium PNS	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak	
5.2.1.01.06	Honorarium Staf PPTK	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	
5.2.1.03	Uang Lembur	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)	
5.2.2.01.04	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	
5.2.2.01.09	Belanja bahan habis pakai material kesehatan	
5.2.2.01.10	Belanja bahan habis pakai material laboratorium	
5.2.2.01.11	Belanja bahan habis pakai material besi	
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit	
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai radiologi	
5.2.2.01.14	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor	
5.2.2.01.15	Belanja bahan kelengkapan pertukangan	
5.2.2.01.16	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin	
5.2.2.01.17	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika	
5.2.2.01.18	Belanja bahan habis pakai radiologi	

1	2	3
5.2.2.01.19	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan	
5.2.2.01.20	Belanja bahan pengharum ruangan	
5.2.2.01.21	Belanja bahan pelumas	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	
5.2.2.02.06	Belanja tas kegiatan	
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	
5.2.2.02.08	Belanja Plakat, Souvenir dan Figura	
5.2.2.02.09	Belanja dekorasi	
5.2.2.02.10	Belanja dokumentasi	
5.2.2.02.11	Belanja bahan arsip dokumen	
5.2.2.02.12	Belanja kelengkapan olah raga	
5.2.2.02.13	Belanja bahan specimen	
5.2.2.02.14	Belanja bahan inseminasi buatan	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	
5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	
5.2.2.02.18	Belanja bahan makan ternak	
5.2.2.02.19	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara	
5.2.2.02.20	Belanja bahan pupuk	
5.2.2.02.21	Belanja baju pasien	
5.2.2.02.22	Belanja bahan pestisida	
5.2.2.02.23	Belanja bahan citra satelit/foto udara	
5.2.2.02.24	Belanja Cetak Sawah	
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan	
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01	Belanja jasa telepon	
5.2.2.03.02	Belanja jasa air	
5.2.2.03.03	Belanja jasa listrik	
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang	
5.2.2.03.05	Belanja berlangganan surat kabar / majalah	
5.2.2.03.06	Belanja jasa kawat / faksimili / internet	
5.2.2.03.07	Belanja jasa paket / pengiriman	
5.2.2.03.08	Belanja jasa sertifikasi	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	
5.2.2.03.14	Belanja jasa administrasi peserta	
5.2.2.03.15	Belanja jasa perawatan kesehatan	
5.2.2.03.16	Belanja jasa administrasi pengolahan arsip SKPKD/KPKD	
5.2.2.03.17	Belanja jasa analisis di laboratorium	
5.2.2.03.18	Belanja jasa dekorasi	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS	
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kematian Non PNS	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service kendaraan bermotor	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	
5.2.2.06.03	Belanja penjiilidan	
5.2.2.06.04	Belanja layout dan typesetting	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	

1	2	3
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	
5.2.2.07.05	Belanja sewa tanah	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	
5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	
5.2.2.09.02	Belanja sewa Bulldoser	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	
5.2.2.10.08	Belanja sewa mesin peralatan kerja	
5.2.2.10.09	Belanja sewa GPS	
5.2.2.10.10	Belanja sewa Kompas	
5.2.2.10.11	Belanja sewa Mesin Bor	
5.2.2.10.12	Belanja sewa planimeter	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	
5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	PENAMBAHAN
5.2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	
5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	
5.2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	
5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	
5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	
5.2.2.18	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	
5.2.2.18.02	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual	
5.2.2.18.03	Belanja Jasa Publikasi Media Internet	
5.2.2.19	Belanja Jasa Kebersihan	

1	2	3
5.2.2.19.01	Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga	
5.2.2.20	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.20.01	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.21	Belanja Pajak	
5.2.2.21.01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	
5.2.2.22	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.22.01	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.22.02	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.2.22.04	Belanja Pemeliharaan Sungai, Suak, dan Saluran Air	
5.2.2.23	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.23.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.2.2.23.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.2.2.23.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.2.2.24	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.24.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5.2.2.24.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5.2.2.24.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	
5.2.2.24.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3	
5.2.2.24.05	Belanja Beasiswa Izin Belajar Bagi PNS	
5.2.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi	
5.2.2.25.03	Belanja Kepesertaan	
5.2.2.26	Belanja Barang Dana BOS	
5.2.2.26.01	Belanja Barang Dana BOS	
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan Jasa	
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli	
5.2.2.30.01	Honorarium narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.30.02	Akomodasi narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.30.03	Transport narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	
5.2.2.31.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	
5.2.2.31.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	
5.2.2.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	
5.2.2.33	Belanja Beasiswa Pendidikan	
5.2.2.33.01	Bantuan Praja IPDN	
5.2.2.34	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.34.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.34.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.35	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.35.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5.2.2.35.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5.2.3	Belanja Modal	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	

1	2	3
5.2.3.01.04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik	
5.2.3.01.05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak	
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	
5.2.3.01.08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	
5.2.3.01.09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus	
5.2.3.01.10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus	
5.2.3.01.11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan	
5.2.3.01.12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo	
5.2.3.01.13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal	
5.2.3.01.14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga	
5.2.3.01.15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis	
5.2.3.01.16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	
5.2.3.01.17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan	
5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	
5.2.3.01.20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman	
5.2.3.01.21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	
5.2.3.01.22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah	
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	
5.2.3.01.24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan	
5.2.3.01.25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian	
5.2.3.01.26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan	
5.2.3.01.27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan	
5.2.3.01.28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan	
5.2.3.01.29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan	
5.2.3.01.30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Jalan	
5.2.3.01.32	Belanja modal pengadaan tanah kawasan industri	
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.2.3.02.01	Belanja modal pengadaan traktor	
5.2.3.02.02	Belanja modal pengadaan bulldozer	
5.2.3.02.03	Belanja modal pengadaan stoom wals	
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator	
5.2.3.02.05	Belanja modal pengadaan dump truk	
5.2.3.02.06	Belanja modal pengadaan crane	
5.2.3.02.07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan	
5.2.3.02.08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen	
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	
5.2.3.03.07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
5.2.3.03.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
5.2.3.03.14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	
5.2.3.04.02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
5.2.3.04.03	Belanja modal pengadaan becak	
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda	
5.2.3.04.05	Belanja modal pengadaan karavan	
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
5.2.3.05.01	Belanja modal pengadaan kapal motor	
5.2.3.05.02	Belanja modal pengadaan kapal feri	
5.2.3.05.03	Belanja modal pengadaan speed boat	
5.2.3.05.04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel	
5.2.3.05.05	Belanja modal pengadaan hydro foil	
5.2.3.05.06	Belanja modal pengadaan jet foil	
5.2.3.05.07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat	
5.2.3.05.08	Belanja modal pengadaan kapal tanker	
5.2.3.05.09	Belanja modal pengadaan kapal kargo	

1	2	3
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan perahu layar	
5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan perahu sampan	
5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang	
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet	
5.2.3.06.05	Belanja modal pengadaan perahu rakit	
5.2.3.06.06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci	
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo	
5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang	
5.2.3.07.03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter	
5.2.3.07.04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran	
5.2.3.07.05	Belanja modal pengadaan pesawat capung	
5.2.3.07.06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang amfibi	
5.2.3.07.07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las	
5.2.3.08.02	Belanja modal pengadaan mesin bubut	
5.2.3.08.03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak	
5.2.3.08.04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras	
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan Dinamo	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin packaging	
5.2.3.08.08	Belanja modal pengadaan generator	
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan	
5.2.3.08.10	Belanja modal pengadaan peralatan kelistrikan	
5.2.3.08.11	Belanja modal pengadaan peralatan teknisi elektronika	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian	
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah	
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan mesin bajak	
5.2.3.09.04	Belanja modal pengadaan alat penetas	
5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak	
5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan peralatan RPH/RPU	
5.2.3.09.08	Belanja modal pengadaan alat inseminasi buatan	
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan karamba	
5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan jaring, pukot dan sejenisnya	
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan kincir	
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan mesin penyuling	
5.2.3.09.13	Belanja modal pengadaan mesin penggiling	
5.2.3.09.14	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan	
5.2.3.09.15	Belanja modal pengadaan mesin pengurai hasil pertanian	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	
5.2.3.10.03	Belanja modal pengadaan mesin stensil	
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	
5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan mesin cetak	
5.2.3.10.06	Belanja modal pengadaan mesin jilid	
5.2.3.10.07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	
5.2.3.10.09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik	
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan alat pompa	
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	
5.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan genset	
5.2.3.10.16	Belanja modal pengadaan peralatan laundry	
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan Trafo	
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan mesin laminating	
5.2.3.10.19	Belanja modal pengadaan mesin fogging	
5.2.3.10.20	Belanja modal pengadaan spraycan dan hand sprayer (alat penyemprot)	
5.2.3.10.21	Belanja modal pengadaan peralatan Packaging	
5.2.3.10.22	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.10.23	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya	
5.2.3.10.24	Belanja modal pengadaan alat musik	

1	2	3
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan meja gambar	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan penyekat ruangan	
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan kipas angin	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)	
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan	
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	
5.2.3.13.06	Belanja modal pengadaan kursi makan	
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan perabot ruangan (rak buku / rak tv)	
5.2.3.13.10	Belanja modal pengadaan filling cabinet dan lemari besi	
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan perabot penghias ruangan (vas bunga dll)	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan	
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan peralatan makan (piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau)	
5.2.3.14.08	Belanja modal pengadaan tungku besi	
5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan peralatan masak (dandang / wajan / kuai dan sejenisnya)	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya	
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan peralatan Audio	
5.2.3.16.05	Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar Radio dan Televisi	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon	
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	
5.2.3.17.03	Belanja modal pengadaan radio SSB	
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	
5.2.3.17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF	
5.2.3.17.06	Belanja modal pengadaan radio UHF	
5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan alat sandi	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan	
5.2.3.18.02	Belanja modal pengadaan teodolite	
5.2.3.18.03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi	

1	2	3
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	
5.2.3.18.05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	
5.2.3.18.06	Belanja modal pengadaan barometer	
5.2.3.18.07	Belanja modal pengadaan seismograph	
5.2.3.18.08	Belanja modal pengadaan ultrasonograph	
5.2.3.18.09	Belanja modal pengadaan alat Automatic Water Level Recording (AWLR)	
5.2.3.18.10	Belanja modal pengadaan alat ARR	
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat ukur panjang	
5.2.3.18.12	Belanja modal pengadaan bejana ukur	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	
5.2.3.19.03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT	
5.2.3.19.04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata	
5.2.3.19.05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	
5.2.3.19.06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak	
5.2.3.19.07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
5.2.3.19.08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
5.2.3.19.09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi	
5.2.3.19.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	
5.2.3.19.11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	
5.2.3.19.12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	
5.2.3.19.14	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran penyakit dalam/internis	
5.2.3.19.15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat	
5.2.3.19.16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi	
5.2.3.19.17	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi	
5.2.3.19.18	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anasthesi	
5.2.3.19.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran forensik	
5.2.3.19.20	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi	
5.2.3.19.21	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik	
5.2.3.19.22	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran prostodentie	
5.2.3.19.23	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodontie	
5.2.3.19.24	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik	
5.2.3.19.25	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi	
5.2.3.19.26	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	
5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	
5.2.3.20.04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	
5.2.3.20.05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	
5.2.3.20.06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	
5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	
5.2.3.21.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over	
5.2.3.21.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass	
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung	
5.2.3.22.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton	
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	
5.2.3.22.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan timbang	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
5.2.3.23.01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	
5.2.3.23.02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk	
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	
5.2.3.23.04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	
5.2.3.23.07	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir	
5.2.3.23.08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air	
5.2.3.23.09	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai	
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai	
5.2.3.23.11	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau	

1	2	3
5.2.3.23.12	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah	
5.2.3.23.13	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur dan pengeboran	
5.2.3.23.14	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	
5.2.3.23.15	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya	
5.2.3.23.16	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pabrik dan sejenisnya	
5.2.3.23.17	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan balai	
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	
5.2.3.24.03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan peralatan pembangkit listrik	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	
5.2.3.26.02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	
5.2.3.26.05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	
5.2.3.26.06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	
5.2.3.26.07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan	
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik	
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum	
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian	
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan Jerjak	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
5.2.3.27.01	Belanja modal pengadaan buku matematika	
5.2.3.27.02	Belanja modal pengadaan buku fisika	
5.2.3.27.03	Belanja modal pengadaan buku kimia	
5.2.3.27.04	Belanja modal pengadaan buku biologi	
5.2.3.27.05	Belanja modal pengadaan buku biografi	
5.2.3.27.06	Belanja modal pengadaan buku geografi	
5.2.3.27.07	Belanja modal pengadaan buku astronomi	
5.2.3.27.08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi	
5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	
5.2.3.27.10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	
5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	
5.2.3.27.12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	
5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
5.2.3.27.14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
5.2.3.27.16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
5.2.3.27.17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	
5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	
5.2.3.27.19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
5.2.3.27.20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan	
5.2.3.27.21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
5.2.3.27.22	Belanja modal pengadaan buku naskah	
5.2.3.27.23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)	
5.2.3.27.24	Belanja modal pengadaan mikrofilm	
5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta / atlas / globe	
5.2.3.27.26	Belanja modal pengadaan buku pertanian	
5.2.3.27.27	Belanja modal pengadaan buku Bahasa Inggris	
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku Karya Umum	
5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku filsafat	
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku ilmu sosial	
5.2.3.27.31	Belanja modal pengadaan buku ilmu murni	
5.2.3.27.32	Belanja modal pengadaan buku terapan	
5.2.3.27.33	Belanja modal pengadaan buku kesenian dan olahraga	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan lukisan / foto	
5.2.3.28.02	Belanja modal pengadaan patung	
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	
5.2.3.28.04	Belanja modal pengadaan pahatan	
5.2.3.28.05	Belanja modal pengadaan batu alam	
5.2.3.28.06	Belanja modal pengadaan maket / miniatur / diorama	
5.2.3.28.07	Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus	

1	2	3
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
5.2.3.29.01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang	
5.2.3.29.02	Belanja modal pengadaan ternak	
5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
5.2.3.30.01	Belanja modal pengadaan senjata api	
5.2.3.30.02	Belanja modal pengadaan radar	
5.2.3.30.03	Belanja modal pengadaan mobil water canon	
5.2.3.30.04	Belanja modal pengadaan borgol	
5.2.3.30.05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet	
5.2.3.30.06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng	
5.2.3.30.07	Belanja modal pengadaan detektor logam	
5.2.3.30.08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru	
5.2.3.30.09	Belanja modal pengadaan pentungan	
5.2.3.30.10	Belanja modal pengadaan helm	
5.2.3.30.11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	
5.2.3.30.12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang / Papan Petunjuk	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk jalan	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk pariwisata	
5.2.3.32	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	
5.2.3.32.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	
5.2.3.33	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.33.01	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum (DAU)	
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
6.1.1.02.05	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	
6.1.1.02.06	Dana Penyesuaian	
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
6.1.1.03.01	Lain-lain Pendapatan yang sah	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	
6.1.1.04.12	Penghematan lainnya	
6.1.1.05	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01	Uang jaminan	
6.1.1.05.02	Potongan Taspen	
6.1.1.05.03	Potongan Beras	

1	2	3
6.1.1.05.04	Askes	
6.1.1.05.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya	
6.1.1.06	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.07	Pelampauan penerimaan pembiayaan	<i>PENAMBAHAN</i>
6.1.1.07.01	Pelampauan penerimaan pembiayaan	<i>PENAMBAHAN</i>
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan nomor	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01	BUMD	
6.1.3.01.01	Dst	
6.1.3.02	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman	
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01	Bank	
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.05	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
6.1.4.05.01	Obligasi atas nama	
6.1.4.05.02	Obligasi nomor	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1.6.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	
6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	
6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	
6.1.6.02	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.03	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01	Pemerintah daerah	
6.1.6.04	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.6.04.01	Bank	
6.1.6.05	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.7	Pengembalian Penyertaan Modal	
6.1.7.01	Pengembalian penyertaan modal pemda	
6.1.7.01.01	Pengembalian penyertaan modal pemda dari BUMD	
6.1.7.01.02	Pengembalian penyertaan modal pemda dari Bank	
6.1.8	Penerimaan Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.8.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan daerah yang Dipisahkan	

1	2	3
6.1.8.01.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.9	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1.1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.01	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01	BUMN	
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01	PT Permodalan Siak (PERSI)	
6.2.2.02.02	PT Siak Pertambangan Energi (SPE)	
6.2.2.02.03	PT Kawasan Industri Buton (KIB)	
6.2.2.02.04	PT Bank Riau	
6.2.2.02.05	PT. Sarana Pembangunan Siak	
6.2.2.03	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01	Badan	
6.2.2.04	Dana Bergulir	
6.2.2.04.1	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	
6.2.3	Pembayaran Utang Pemerintah Daerah	
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.03.01	Bank	
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.06.01	Pemerintah daerah	
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01	Bank	
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.09	Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02	Obligasi nomor	
6.2.3.10	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02	Obligasi nomor	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01	Pemerintah	
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain	

1	2	3
6.2.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.5	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga	
6.2.5.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	
6.2.5.01.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga Lainnya	
6.2.6	Pengembalian Penerimaan Daerah	
6.2.6.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dana PAD Lainnya	
6.2.6.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Perimbangan	
6.2.6.02.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAK	
6.2.6.02.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAU	
6.2.6.03	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
6.2.6.03.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Penyesuaian	
6.2.6.03.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah Lainnya	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran VI : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 36 Tahun 2015
 Tanggal : 23 Juli 2015

**DAFTAR KODE AKUN NERACA
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.01	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.01.02	Bagi Hasil/SiLPA	
1.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.1.1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1.1.1.01.05	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.1.01.06	Dana Alokasi Umum	
1.1.1.01.07	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
1.1.1.01.08	Pendapatan Hibah	
1.1.1.01.09	Dana Darurat	
1.1.1.01.10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.1.1.01.12	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.13	DAK Bid. Infrastruktur	
1.1.1.01.14	DAK Bid. Pertanian	
1.1.1.01.15	DAK Bid. Kesehatan	
1.1.1.01.16	DAK Bid. Pendidikan	
1.1.1.01.17	DAK Bid. Kelautan dan Perikanan	
1.1.1.01.18	DAK Bid. Prasarana Pemda	
1.1.1.01.19	DAK Bid. Lingkungan Hidup	
1.1.1.01.20	Kas Umum Daerah	
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1.1.1.03.01	Kas Pada Bendahara	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.2.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.02	Investasi dalam Obligasi	
1.1.2.02.01	Investasi dalam Obligasi	
1.1.3	Piutang	
1.1.3.01	Piutang Pajak	
1.1.3.01.01	Piutang Pajak	
1.1.3.02	Piutang Retribusi	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	
1.1.3.03	Piutang Dana Bagi Hasil	
1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	
1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.3.04	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum	

1	2	3
1.1.3.05	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.4	Piutang Lain-lain	
1.1.4.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	
1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.1.4.02	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.03	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.04	Piutang Dividen	
1.1.4.04.01	Piutang Dividen	
1.1.4.05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1.1.4.06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.5	Persediaan	
1.1.5.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.02	Persediaan Alat Listrik	
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Tulis Listrik	
1.1.5.03	Persediaan Material/Bahan	
1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	
1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	
1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak	
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	
1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia	
1.1.5.04	Persediaan Benda Pos	
1.1.5.04.01	Persediaan Perangkat	
1.1.5.04.02	Persediaan Materai	
1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel	
1.1.5.05	Persediaan Bahan Bakar	
1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar minyak	
1.1.5.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	Investasi Non Permanen	
1.2.1.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.01.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.02	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.02.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.03	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.03.01	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.04	Investasi dalam Surat Utang Negara	
1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara	

1	2	3
1.2.1.05	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.2	Investasi Permanen	
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.02	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.04	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya	
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Kantor	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	
1.3.1.02	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.02.01	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.03	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.03.01	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.04	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.04.01	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.05	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.05.01	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.06	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.06.01	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.07	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	
1.3.1.07.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	
1.3.1.08	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.08.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.09	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus	
1.3.1.09.01	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa	
1.3.1.09.02	Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus	
1.3.1.10	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus	
1.3.1.10.01	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	
1.3.1.10.02	Tanah Sarana Pendidikan Kursus	
1.3.1.11	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.11.01	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.12	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.12.01	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.13	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.13.01	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.14	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.14.01	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.15	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	

1	2	3
1.3.1.15.01	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	
1.3.1.16	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.16.01	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.17	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.1.17.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.1.18	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.18.01	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.19	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.19.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.20	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.20.01	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.21	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.21.01	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.22	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.22.01	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.23	Tanah Sarana Stadion Olahraga	
1.3.1.23.01	Tanah Sarana Umum Olahraga	
1.3.1.24	Tanah Perumahan	
1.3.1.24.01	Tanah Perumahan	
1.3.1.25	Tanah Pertanian	
1.3.1.25.01	Tanah Pertanian	
1.3.1.26	Tanah Perkebunan	
1.3.1.26.01	Tanah Perkebunan	
1.3.1.27	Tanah Perikanan	
1.3.1.27.01	Tanah Perikanan	
1.3.1.28	Tanah Peternakan	
1.3.1.28.01	Tanah Peternakan	
1.3.1.29	Tanah Perkampungan	
1.3.1.29.01	Tanah Perkampungan	
1.3.1.30	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.1.30.01	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-alat Berat	
1.3.2.01.01	Traktor	
1.3.2.01.02	Buldozer	
1.3.2.01.03	Stoom Wals	
1.3.2.01.04	Eskavator	
1.3.2.01.05	Dump Truk	
1.3.2.01.06	Crane	
1.3.2.01.07	Kendaraan penyapu jalan	
1.3.2.01.08	Mesin pengolah semen	
1.3.2.01.09	Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.02.01	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
1.3.2.02.02	Alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
1.3.2.02.04	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	
1.3.2.02.05	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
1.3.2.02.06	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	

1	2	3
1.3.2.02.07	Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
1.3.2.02.08	Alat-alat angkutan darat bermotor boks	
1.3.2.02.09	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
1.3.2.02.10	Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
1.3.2.02.11	Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
1.3.2.02.13	Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
1.3.2.02.14	Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
1.3.2.03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
1.3.2.03.01	Gerobak	
1.3.2.03.02	Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
1.3.2.03.03	Becak	
1.3.2.03.04	Sepeda	
1.3.2.03.05	Karavan	
1.3.2.04	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
1.3.2.04.01	Kapal motor	
1.3.2.04.02	Kapal feri	
1.3.2.04.03	Speed boat	
1.3.2.04.04	Motor boat/motor tempel	
1.3.2.04.05	Hydro foil	
1.3.2.04.06	Jet foil	
1.3.2.04.07	Kapal tug boat	
1.3.2.04.08	Kapal tanker	
1.3.2.04.09	Kapal kargo	
1.3.2.05	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
1.3.2.05.01	Perahu layar	
1.3.2.05.02	Perahu sampan	
1.3.2.05.03	Perahu tongkang	
1.3.2.05.04	Perahu karet	
1.3.2.05.05	Perahu rakit	
1.3.2.05.06	Perahu sekoci	
1.3.2.06	Alat-alat Angkutan Udara	
1.3.2.06.01	Pesawat kargo	
1.3.2.06.02	Pesawat penumpang	
1.3.2.06.03	Pesawat helikopter	
1.3.2.06.04	Pesawat pemadam kebakaran	
1.3.2.06.05	Pesawat capung	
1.3.2.06.06	Pesawat terbang amfibi	
1.3.2.06.07	Pesawat terbang layang	
1.3.2.07	Alat-alat Bengkel	
1.3.2.07.01	Mesin las	
1.3.2.07.02	Mesin bubut	
1.3.2.07.03	Mesin dongkrak	
1.3.2.07.04	Mesin kompresor	
1.3.2.08	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
1.3.2.08.01	Penggiling hasil pertanian	
1.3.2.08.02	Alat pengering gabah	
1.3.2.08.03	Mesin bajak	
1.3.2.08.04	Alat penetas	
1.3.2.09	Peralatan Kantor	
1.3.2.09.01	Mesin tik	
1.3.2.09.02	Mesin hitung	
1.3.2.09.03	Mesin stensil	
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	
1.3.2.09.05	Mesin cetak	
1.3.2.09.06	Mesin jilid	
1.3.2.09.07	Mesin potong kertas	
1.3.2.09.08	Mesin penghancur kertas	
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	
1.3.2.09.10	Papan visual elektronik	

1	2	3
1.3.2.09.11	Tabung pemadam kebakaran	
1.3.2.10	Perlengkapan Kantor	
1.3.2.10.01	Meja gambar	
1.3.2.10.02	Almari	
1.3.2.10.03	Brankas	
1.3.2.10.04	Filling kabinet	
1.3.2.10.05	White board	
1.3.2.10.06	Penunjuk waktu	
1.3.2.11	Komputer	
1.3.2.11.01	Komputer mainframe/ server	
1.3.2.11.02	Komputer/PC	
1.3.2.11.03	Komputer note book	
1.3.2.11.04	Printer	
1.3.2.11.05	Scanner	
1.3.2.11.06	Monitor/display	
1.3.2.11.07	CPU	
1.3.2.11.08	UPS/Stabilizer	
1.3.2.11.09	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	
1.3.2.11.10	Peralatan jaringan komputer	
1.3.2.12	Meubelair	
1.3.2.12.01	Meja kerja	
1.3.2.12.02	Meja rapat	
1.3.2.12.03	Meja makan	
1.3.2.12.04	Kursi kerja	
1.3.2.12.05	Kursi rapat	
1.3.2.12.06	Kursi makan	
1.3.2.12.07	Tempat tidur	
1.3.2.12.08	Sofa	
1.3.2.12.09	Rak buku/tv/kembang	
1.3.2.13	Peralatan Dapur	
1.3.2.13.01	Tabung gas	
1.3.2.13.02	Kompore gas	
1.3.2.13.03	Lemari makan	
1.3.2.13.04	Dispenser	
1.3.2.13.05	Kulkas	
1.3.2.13.06	Rak piring	
1.3.2.13.07	Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	
1.3.2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	
1.3.2.14.01	Lampu hias	
1.3.2.14.02	Jam dinding/meja	
1.3.2.15	Alat-alat Studio	
1.3.2.15.01	Kamera	
1.3.2.15.02	Handycam	
1.3.2.15.03	Proyektor	
1.3.2.16	Alat-alat Komunikasi	
1.3.2.16.01	Telepon	
1.3.2.16.02	Faximili	
1.3.2.16.03	Radio ssb	
1.3.2.16.04	Radio HF/FM (handy talkie)	
1.3.2.16.05	Radio VHF	
1.3.2.16.06	Radio UHF	
1.3.2.16.07	Alat sandi	
1.3.2.17	Alat-alat Ukur	
1.3.2.17.01	Timbangan	
1.3.2.17.02	Teodolite	
1.3.2.17.03	Alat uji emisi	
1.3.2.17.04	Alat GPS	
1.3.2.17.05	Kompas/peralatan navigasi	
1.3.2.17.06	Bejana ukur	

1	2	3
1.3.2.17.07	Barometer	
1.3.2.17.08	Seismograph	
1.3.2.17.09	Ultrasonograph	
1.3.2.18	Alat-alat Kedokteran	
1.3.2.18.01	Alat-alat kedokteran umum	
1.3.2.18.02	Alat-alat kedokteran gigi	
1.3.2.18.03	Alat-alat kedokteran tht	
1.3.2.18.04	Alat-alat kedokteran mata	
1.3.2.18.05	Alat-alat kedokteran bedah	
1.3.2.18.06	Alat-alat kedokteran anak	
1.3.2.18.07	Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
1.3.2.18.08	Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
1.3.2.18.09	Alat-alat kedokteran kardiologi	
1.3.2.18.10	Alat-alat kedokteran neurologi	
1.3.2.18.11	Alat-alat kedokteran orthopedi	
1.3.2.18.12	Alat-alat kedokteran hewan	
1.3.2.18.13	Alat-alat farmasi	
1.3.2.18.14	Alat-alat penyakit dalam/internis	
1.3.2.19	Alat-alat Laboratorium	
1.3.2.19.01	Alat-alat laboratorium biologi	
1.3.2.19.02	Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
1.3.2.19.03	Alat-alat laboratorium kimia	
1.3.2.19.04	Alat-alat laboratorium pertanian	
1.3.2.19.05	Alat-alat laboratorium peternakan	
1.3.2.19.06	Alat-alat laboratorium perkebunan	
1.3.2.19.07	Alat-alat laboratorium perikanan	
1.3.2.19.08	Alat-alat laboratorium bahasa	
1.3.2.19.09	Alat-alat peraga / praktik sekolah	
1.3.2.20	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
1.3.2.20.01	Senjata api	
1.3.2.20.02	Water canon	
1.3.2.20.03	Borgol	
1.3.2.20.04	Sangkur/bayonet	
1.3.2.20.05	Perisai/tameng	
1.3.2.20.06	Detektor logam	
1.3.2.20.07	Rompi anti peluru	
1.3.2.20.08	Pentungan	
1.3.2.20.09	Helm	
1.3.2.20.10	Alarm/sirene	
1.3.2.20.11	Sentolop/senter	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Gedung Kantor	
1.3.3.01.01	Gedung kantor	
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan	
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas	
1.3.3.03.01	Gedung rumah dinas	
1.3.3.04	Gedung Gudang	
1.3.3.04.01	Gedung gudang	
1.3.3.05	Bangunan bersejarah	
1.3.3.05.01	Bangunan bersejarah	
1.3.3.06	Bangunan monumen	
1.3.3.06.01	Bangunan monumen	
1.3.3.07	Tugu peringatan	
1.3.3.07.01	Tugu peringatan	

1	2	3
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan	
1.3.4.01.02	Jalan fly over	
1.3.4.01.03	Jalan under pass	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan gantung	
1.3.4.02.02	Jembatan ponton	
1.3.4.02.03	Jembatan penyebrangan orang	
1.3.4.02.04	Jembatan penyebrangan diatas air	
1.3.4.03	Jaringan Air	
1.3.4.03.01	Jaringan irigasi/waduk/bendungan	
1.3.4.03.02	Jaringan air bersih/air minum	
1.3.4.03.03	Reservoir	
1.3.4.03.04	Pintu air	
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
1.3.4.04.01	Lampu hias jalan	
1.3.4.04.02	Lampu hias taman	
1.3.4.04.03	Lampu penerang hutan kota	
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon	
1.3.4.05.01	Instalasi Listrik	
1.3.4.05.02	Jaringan Telepon	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan	
1.3.5.01.01	Buku matematika	
1.3.5.01.02	Buku fisika	
1.3.5.01.03	Buku kimia	
1.3.5.01.04	Buku biologi	
1.3.5.01.05	Buku biografi	
1.3.5.01.06	Buku geografi	
1.3.5.01.07	Buku astronomi	
1.3.5.01.08	Buku arkeologi	
1.3.5.01.09	Buku bahasa dan sastra	
1.3.5.01.10	Buku keagamaan	
1.3.5.01.11	Buku sejarah	
1.3.5.01.12	Buku seni dan budaya	
1.3.5.01.13	Buku ilmu pengetahuan umum	
1.3.5.01.14	Buku ilmu pengetahuan sosial	
1.3.5.01.15	Buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
1.3.5.01.16	Buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
1.3.5.01.17	Buku ensiklopedia	
1.3.5.01.18	Buku kamus bahasa	
1.3.5.01.19	Buku ekonomi dan keuangan	
1.3.5.01.20	Buku industri dan perdagangan	
1.3.5.01.21	Buku peraturan perundang-undangan	
1.3.5.01.22	Buku naskah	
1.3.5.01.23	Terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
1.3.5.01.24	Mikrofilm	
1.3.5.01.25	Peta/atlas/globe	
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
1.3.5.02.01	Lukisan/foto	
1.3.5.02.02	Patung	
1.3.5.02.03	Ukiran	
1.3.5.02.04	Pahatan	
1.3.5.02.05	Batu alam	
1.3.5.02.06	Maket/miniatur/diorama	
1.3.5.03	Hewan/Ternak dan Tanaman	
1.3.5.03.01	Hewan kebun binatang	

1	2	3
1.3.5.03.02	Ternak	
1.3.5.03.03	Tanaman	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.01.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.02	Bangun serah guna(Build, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.02.01	Bangun serah gunaBuild, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain	
1.6	RK SKPD	
1.6.1	URUSAN WAJIB	
1.6.1.01	PENDIDIKAN	
1.6.1.01.01	RK DINAS PENDIDIKAN	
1.6.1.02	KESEHATAN	
1.6.1.02.01	RK Dinas Kesehatan	
1.6.1.02.02	RK Rumah Sakit Umum Daerah	

1	2	3
1.6.1.03	PEKERJAAN UMUM	
1.6.1.03.01	RK Dinas Pekerjaan Umum	
1.6.1.04	PERUMAHAN	
1.6.1.04.01	RK Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	
1.6.1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1.6.1.06.01	RK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1.6.1.07	PERHUBUNGAN	
1.6.1.07.01	RK Dinas Perhubungan dan Infokom	
1.6.1.08	LINGKUNGAN HIDUP	
1.6.1.08.02	RK Badan Lingkungan Hidup	
1.6.1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1.6.1.10.01	RK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.6.1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.6.1.11.01	RK Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	
1.6.1.13	SOSIAL	
1.6.1.13.01	RK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
1.6.1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1.6.1.15.01	RK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	
1.6.1.16	PENANAMAN MODAL	
1.6.1.16.01	RK Kantor Penanaman Modal	
1.6.1.17	KEBUDAYAAN	
1.6.1.17.01	RK Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	
1.6.1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1.6.1.19.01	RK Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
1.6.1.19.03	RK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
1.6.1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	
1.6.1.20.01	RK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.1.20.02	RK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
1.6.1.20.03	RK Sekretariat Daerah	
1.6.1.20.04	RK Sekretariat DPRD	
1.6.1.20.05	RK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1.6.1.20.06	RK Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.6.1.20.07	RK Inspektorat	
1.6.1.20.09	RK Badan Kepegawaian Daerah	
1.6.1.20.10	RK Kecamatan Siak	
1.6.1.20.11	RK Kecamatan Sungai Apit	
1.6.1.20.12	RK Kecamatan Minas	
1.6.1.20.13	RK Kecamatan Tualang	
1.6.1.20.14	RK Kecamatan Dayun	
1.6.1.20.15	RK Kecamatan Kerinci Kanan	
1.6.1.20.16	RK Kecamatan Bunga Raya	
1.6.1.20.17	RK Kecamatan Sungai Mandau	
1.6.1.20.18	RK Kecamatan Kandis	
1.6.1.20.19	RK Kecamatan Koto Gasib	
1.6.1.20.20	RK Kecamatan Lubuk Dalam	
1.6.1.20.21	RK Kecamatan Sabak Auh	
1.6.1.20.22	RK Kecamatan Mempura	
1.6.1.20.23	RK Kecamatan Pusako	
1.6.1.20.24	RK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
1.6.1.21	KETAHANAN PANGAN	
1.6.1.21.01	RK Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
1.6.1.24	KEARSIPAN	

1	2	3
1.6.1.24.01	RK Kantor Perpustakaan dan Arsip	
1.6.2	URUSAN PILIHAN	
1.6.2.01	PERTANIAN	
1.6.2.01.01	RK Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
1.6.2.02	KEHUTANAN	
1.6.2.02.01	RK Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.01	Utang Taspen	
2.1.1.02	Utang Askes	
2.1.1.02.01	Utang Askes	
2.1.1.03	Utang PPh Pusat	
2.1.1.03.01	Utang PPh Pusat	
2.1.1.04	Utang PPN Pusat	
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	
2.1.1.05	Utang Taperum	
2.1.1.05.01	Utang Taperum	
2.1.1.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.02	Iuran Wajib Pegawai	
2.1.1.06.03	Tabungan Perumahan Pegawai	
2.1.1.06.05	Iuran Kesehatan	
2.1.1.06.06	Denda	
2.1.1.06.07	Iuran Aspek	
2.1.2	Utang Bunga	
2.1.2.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.01.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.02	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.03	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD	
2.1.2.03.01	Utang Bunga kepada BUMN	
2.1.2.03.02	Utang Bunga kepada BUMD	
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan	
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank	
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan	
2.1.2.05	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.06	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.3	Utang Pajak	
2.1.3.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	

1	2	3
2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2.1.3.03	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.03.01	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.04	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2.1.4.01	Utang Bank	
2.1.4.01.01	Utang Bank	
2.1.4.02	Utang Obligasi	
2.1.4.02.01	Utang Obligasi	
2.1.4.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten	
2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.5.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2.1.5.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.2	Utang Luar Negeri	
2.2.2.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
3	EKUITAS DANA	

1	2	3
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.2	Cadangan Piutang	
3.1.2.01	Cadangan Piutang	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	
3.1.3	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	
3.1.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.4	RK PPKD	
3.4.1	RK PPKD	
3.4.1.01	RK PPKD	
3.4.1.01.01	RK PPKD	



 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR